



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MERDEKA
BELAJAR

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PANDUAN

PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN 2023 (PPK ORMAWA)



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Nizam
Sri Gunani Partiw

PENYUSUN

Illah Saillah
Uyu Wahyudin
Parmin
Yanfri Bakhtiar
Mintarti
Ujang Suwarna
Soecipto
Indra Wulida Ramdan
Sukino
Dhaniek Wardhanie

KATA PENGANTAR

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan *soft skills*. Mahasiswa di dalam ormawa mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki sehingga memiliki kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan. Pengelolaan organisasi kemahasiswaan menjadi kewenangan perguruan tinggi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Untuk itu pada Tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi memberi kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan nyata di masyarakat, kapasitas, dan kemampuan organisasi kemahasiswaan diharapkan akan lebih bermakna sebagai wadah mahasiswa mengembangkan *soft skills* sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah untuk menjadi SDM Unggul. Program yang ditawarkan yaitu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).

PPK Ormawa merupakan pelaksanaan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi kemahasiswaan. PPK Ormawa akan terus ditingkatkan baik jumlah proposal, maupun jumlah organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi pengusul. Program ini akan terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih memberikan motivasi dan menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam implementasi bela negara dan menumbuhkan cinta tanah air.

Berbagai praktik yang baik dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di program ini merupakan aktualisasi ciri pembelajaran abad 21 yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu menyelesaikan masalah, komunikatif, kolaboratif, memiliki literasi teknologi informasi, berjiwa kepemimpinan, dan bertindak positif dan produktif atas dorongan nurani. Pelaksanaan PPK Ormawa juga diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas Ormawa, dan berdampak pada karakter mahasiswa yang berjiwa Pancasila, memiliki daya kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama dalam tim.

Setiap Perguruan Tinggi diharapkan memiliki beragam inovasi dan kreasi dalam membina organisasi kemahasiswaan melalui pelaksanaan PPK Ormawa. Proses pembinaan, pendampingan, pemantauan dan dukungan perlu dilakukan agar setiap organisasi kemahasiswaan mampu melaksanakan PPK Ormawa dengan hasil yang terukur, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pihak yang terlibat, pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan dan tim PPK Ormawa kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam melaksanakan program ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi sumbangsih kita untuk kehidupan bangsa dan negara yang lebih sejahtera.

Jakarta, Februari 2023
plt. Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
TTD
Sri Gunani Partiw

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISIiv

I. PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. DASAR HUKUM 3

 C. MISI, TEMA DAN TUJUAN 3

II. TATA KELOLA PT, ORMAWA, DESA 5

 A. TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 5

 B. TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN 7

 C. TATA KELOLA DESA 9

III. LOKASI DAN TOPIK 13

 A. LOKASI..... 13

 B. TOPIK 13

IV. LUARAN..... 26

 A. LUARAN WAJIB 26

 B. LUARAN TAMBAHAN 26

V. PENGUSUL DAN PROPOSAL 27

 A. PENGUSUL 27

 B. PROPOSAL DAN SUBPROPOSAL 27

 C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN UNGGAH PROPOSAL DAN SUBPROPOSAL..... 28

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN MEKANISME PROGRAM..... 29

 A. INDIKATOR KEBERHASILAN 29

 B. MEKANISME PROGRAM..... 29

VII. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 31

 A. MEKANISME BANTUAN 31

 B. BIAYA 31

 C. JADWAL KEGIATAN 33

VIII. PENILAIAN PROPOSAL, SUBPROPOSAL, DAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM 34

 A. PENILAIAN PROPOSAL DAN SUBPROPOSAL..... 34

 B. PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM..... 34

IX. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 35

 A. MONITORING DAN EVALUASI 35

 B. PELAPORAN 35

X. LAMPIRAN..... 36

 LAMPIRAN 1 SISTEMATIKA PROPOSAL PERGURUAN TINGGI 36

LAMPIRAN 2 SISTEMATIKA SUBPROPOSAL ORMAWA	38
LAMPIRAN 3 SISTEMATIKA LAPORAN KEMAJUAN PERGURUAN TINGGI	41
LAMPIRAN 4 SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PERGURUAN TINGGI.....	43
LAMPIRAN 5 SISTEMATIKA SUBLAPORAN AKHIR ORMAWA	45
LAMPIRAN 6 FORMAT SAMPUL MUKA PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/ LAPORAN AKHIR PERGURUAN TINGGI.....	47
LAMPIRAN 7 FORMAT SAMPUL MUKA SUBPROPOSAL/SUBLAPORAN AKHIR ORMAWA	48
LAMPIRAN 8 FORMAT HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/LAPORAN AKHIR PT	49
LAMPIRAN 9 FORMAT HALAMAN PENGESAHAN SUBPROPOSAL/SUBLAPORAN AKHIR ORMAWA	50
LAMPIRAN 10 FORMAT PENGEMBALIAN SISA DANA.....	51
LAMPIRAN 11 KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL.....	52
LAMPIRAN 12 KRITERIA PENILAIAN SUBPROPOSAL	53
LAMPIRAN 13 KRITERIA PENILAIAN KAPASITAS ORMAWA	54
LAMPIRAN 14 KRITERIA PENILAIAN <i>SOFT SKILLS</i> FUNGSIONARIS ORMAWA	55
LAMPIRAN 15 KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN ORMAWA	56
LAMPIRAN 16 KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI INDIVIDU MAHASISWA PELAKSANA PPK ORMAWA	57
LAMPIRAN 17 KRITERIA PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM	58
LAMPIRAN 18 FORMAT POSTER PPK ORMAWA.....	59
LAMPIRAN 19 FORMAT ISIAN PROFIL PPK ORMAWA	60
LAMPIRAN 20 SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA	61
LAMPIRAN 21 SURAT PERNYATAAN PELAKSANA PPK ORMAWA.....	62
LAMPIRAN 22 FORM PEMUTAKHIRAN DATA SASARAN	63
LAMPIRAN 23 BERITA ACARA SELEKSI INTERNAL PERGURUAN TINGGI	64
LAMPIRAN 24 DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020 – 2024 DAN DAERAH P2KE.....	65

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transformasi digital yang menjadi platform baru di hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini telah menyebabkan perubahan yang sangat cepat di seluruh dunia, termasuk di dunia pendidikan tinggi. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang super cepat menjadi salah satu kemampuan penting bagi sivitas akademika sebagai manusia yang berdaulat, maupun bagi institusi perguruan tinggi (PT) untuk meraih sukses yang diharapkan. Masyarakat telah berubah dari *primitive* ke *smart society*, terkoneksi secara terus menerus, digerakkan oleh generasi Z yang kreatif, cepat, tanpa batas, kolaborasi dan terkoneksi. Perguruan tinggi juga telah mengalami perubahan paradigma berpikir dari pelaksanaan Tridharma yang terpisah dengan edukasi sebagai dharma utama, menjadi edukasi, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang integratif, saling mendukung dan menguatkan menuju perguruan tinggi *entrepreneur* yang mengusung prinsip *growth mind set* dan bukan *fix mind set*.

Respon terhadap perubahan dunia yang sangat cepat tersebut antara lain disampaikan dalam arahan Presiden Republik Indonesia untuk program kerja 2019 sampai dengan 2024 yaitu Indonesia harus mampu menciptakan sumber daya manusia dengan karakter unggul. Berbagai upaya dalam bentuk program kerja telah dan akan tetap dilakukan yaitu implementasi bela negara, pendidikan karakter, debirokratisasi dan deregulasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. Pendidikan tinggi menjadi tumpuan harapan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkarakter unggul melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Melalui pembelajaran intra-kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, mahasiswa diharapkan menjadi insan dewasa yang memiliki kemampuan berupa *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang dan sinergi. Pada akhirnya lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi agen pembangunan bangsa, dan bahkan mampu menjadi agen transformasi di kehidupan masyarakat. Untuk itu, pembelajaran di perguruan tinggi harus bervariasi baik bentuk maupun metode, serta multi-kanal.

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan global abad 21 pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, lingkungan, dan spiritual. Pada saat ini, pencapaian tantangan tersebut diperlambat dengan terjadinya Pandemi Covid-19. Sementara di sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, sehingga mampu mempercepat penyebaran informasi yang juga berpotensi menimbulkan pemahaman beragam atas isu-isu global dan nasional, serta meningkatkan variasi sumber belajar yang semakin mudah diperoleh oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul, budaya akademik, kolaboratif dan kompetitif, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) membuat kebijakan yaitu: 1) peningkatan mutu *General Education* guna memahami wawasan kebangsaan dan implementasi bela negara (UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia); 2) pengembangan kepemimpinan melalui kegiatan ekstra-kurikuler; 3) peningkatan dosen penggerak, 4) peningkatan tanggung jawab dan partisipasi warga negara; 5) peningkatan *entrepreneurial mindset*; dan 6) penguatan dosen dan mahasiswa menjadi

pembelajar sepanjang hayat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek memberi kesempatan kepada Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbudristek untuk mengusulkan proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) untuk meningkatkan kualitas Ormawa dan sekaligus menumbuhkembangkan *soft skills* dan kompetensi mahasiswa seperti kemampuan berorganisasi, penguatan karakter Pancasila, bela negara, cinta tanah air, dan kebangsaan, kepemimpinan, dan bekerja sama (*team work*). PPK Ormawa merupakan salah satu implementasi dari kebijakan Kemendikbudristek sebab mahasiswa dapat berlatih menjadi pemimpin transformasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. PPK Ormawa adalah program penguatan kapasitas Ormawa melalui serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh PT yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Proposal yang diajukan oleh PT merupakan kumpulan dari berbagai gagasan/ide/usulan kegiatan dari satu atau lebih Ormawa. Gagasan/usulan kegiatan merupakan bentuk pengabdian atau pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Organisasi Kemahasiswaan resmi yang ada di perguruan tinggi, yang dapat diimplementasikan dalam berbagai program sesuai dengan topik yang dipilih. Topik yang dipilih sesuai dengan permasalahan, potensi dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan yang disusun dalam subproposal sebagai lampiran proposal usulan masing-masing PT. Ormawa akan berperan dalam memimpin dan bekerja sama dengan berbagai pihak menjawab tantangan global secara bertanggung jawab dan kreatif, dengan semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peduli pada kepentingan masyarakat dengan mengajak peran serta masyarakat. Mahasiswa pelaksana PPK Ormawa diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah, komunikatif, kolaboratif, berliterasi teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan, bertindak positif dan produktif atas dorongan nurani, memiliki rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa/kelurahan agar terbangun wilayah binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Di sisi lain, masyarakat diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk dikelola menjadi kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis menjadi lebih berkembang dan bermanfaat sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional di wilayah Republik Indonesia.

Topik-topik yang bisa dipilih oleh masing-masing Ormawa PT ada 16 topik dalam panduan PPK Ormawa Tahun 2023. Dari keseluruhan topik yang ada dalam panduan itu dikelompokkan kedalam 4 (empat) klaster/rumpun yaitu: (1) pendidikan; (2) ekonomi; (3) kesehatan; dan (4) lingkungan. Mengacu pada klaster/rumpun yang dipilih oleh masing-masing Ormawa PT dan dielaborasi kedalam topic yang berkaitan dengan program Kampus Merdeka.

Dalam rangka mendukung program Kampus Merdeka, PT diberi kebebasan dalam menentukan jumlah konversi Sistem Kredit Semester (SKS) dan konversi mata kuliah. PT juga diberi kebebasan memberikan nama mata kuliah lain yang sesuai dengan kurikulum masing-masing PT, termasuk jumlah penyeteraan SKS. Apabila PT belum bisa melaksanakan konversi mata kuliah, maka dapat diwujudkan

dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Bentuk dan format SKPI diserahkan pada masing-masing PT.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

C. MISI, TEMA DAN TUJUAN

1. MISI

Misi penyelenggaraan PPK Ormawa adalah:

1. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menguatkan kapasitas Ormawa; dan
2. Memberikan kesempatan kepada Ormawa untuk lebih efektif menjadi wahana penguatan karakter Pancasila dan bela negara mahasiswa.

2. TEMA

“Penguatan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan guna mewujudkan capaian kompetensi pembelajar Abad 21 untuk kesejahteraan masyarakat”

3. TUJUAN

Secara umum kegiatan PPK Ormawa bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar mampu menjadi Organisasi Kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter dan cinta tanah air. Tujuan khusus program adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan untuk menjadi organisasi yang berkarakter Pancasila, berprinsip bela negara dan menjadi inisiator pembangunan;
2. Meningkatkan *soft skills* fungsionaris organisasi kemahasiswaan dalam hal kepemimpinan,

kerja sama tim, kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, kreatif, penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi, dan berliterasi teknologi informasi;

3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang adaptif terhadap perubahan;
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
5. Menginisiasi kemajuan wilayah desa/kelurahan di Indonesia sesuai topik yang dipilih.

II. TATA KELOLA PT, ORMAWA, DESA

A. TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran. Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 13 menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam bidang minat, bakat, serta penalaran. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14 disebutkan bahwa pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 77 menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi, dan mendapatkan legalitas dari pimpinan perguruan tinggi. Pasal 77 juga menyebutkan mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang fungsi untuk; (1) mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa; (2) mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; (3) memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan (4) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 Ditjen Dikti Kemdikbudristek ditegaskan bahwa pembinaan kegiatan Ormawa merupakan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan membina kegiatan Ormawa sesuai dengan tujuan pembinaan mahasiswa serta menghindari pembinaan yang tidak bertanggungjawab. Tanggung jawab perguruan tinggi untuk memastikan kegiatan Ormawa bermanfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan masyarakat melalui tata kelola perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan yang baik.

Setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki tata kelola yang baik dalam mendukung keberhasilan Program Penguatan Kapasitas Ormawa (PPK Ormawa). Tata kelola perguruan tinggi dalam kewenangan mengelola organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu mendukung program penguatan kapasitas ormawa (PPK Ormawa) yang mencakup aspek regulasi, legalitas, dan standar mutu.

a. Regulasi tata kelola organisasi kemahasiswaan

Perguruan tinggi menerbitkan regulasi atau peraturan tentang tata kelola ormawa dalam bentuk surat keputusan, pedoman atau bentuk regulasi lainnya yang digunakan Ormawa dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Regulasi yang diterbitkan perguruan tinggi dijadikan sebagai

dokumen kelengkapan dalam PPK Ormawa. Berbagai regulasi yang diterbitkan pada saat pengusulan program harus masih berlaku.

b. Legalitas kepengurusan

Legalitas ormawa mencakup legalitas pendirian ormawa dan legalitas kepengurusan ormawa. Legalitas pendirian ormawa yang sah dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) pendirian ormawa. Legalitas kepengurusan ormawa yang sah dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan ormawa yang dilengkapi dengan susunan kepengurusan. Legalitas kepengurusan ormawa yang digunakan dalam PPK Ormawa harus masih berlaku pada saat usulan program. SK kepengurusan ormawa diterbitkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang telah ditandatangani dan distempel.

c. Standar mutu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja, dan keberlanjutan program

Perguruan tinggi memiliki standar mutu untuk kegiatan Ormawa. Dokumen standar mutu secara sistematis mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Standar mutu sebagai kendali dan kontrol, agar setiap Ormawa memiliki mekanisme kerja yang terstruktur dan dievaluasi capaian kinerja secara periodik. Perguruan tinggi dapat mengembangkan perangkat penjaminan mutu pembinaan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 Ditjen Dikti Kemdikbudristek. Perguruan tinggi perlu menginisiasi semangat keberlanjutan program, dan mempersiapkan kelembagaan serta SDM pemandu keberlanjutan program. Rencana keberlanjutan program harus dituangkan secara tertulis dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut.

Dalam mendukung keberhasilan program penguatan kapasitas ormawa, tata kelola perguruan tinggi secara operasional meliputi antara lain tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pasca program.

1. Tahap Perencanaan Program:

- a. PT mengadakan konsolidasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan subproposal PPK Ormawa untuk Ormawa yang berminat mengusulkan kegiatan.
- b. PT melakukan seleksi internal terhadap semua subproposal yang diusulkan oleh Ormawa dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Internal PT.
- c. PT menyusun proposal PPK Ormawa sesuai sistematika dan melampirkan subproposal-subproposal dari Ormawa yang telah lolos seleksi internal.
- d. PT mengunggah seluruh persyaratan, proposal PT dan subproposal-subproposal yang telah lolos seleksi internal PT.

2. Tahap Pelaksanaan Program:

- a. PT menerima SK lolos pendanaan, Ormawa melakukan penandatanganan kontrak (SPK);
- b. PT melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana program di lapangan.
- c. PT menyediakan fasilitasi, *support system*, pendampingan kepada tim pelaksana.
- d. PT melalui Operator PT mengunggah catatan harian setiap kegiatan ke *logbook* PPK Ormawa.

3. Tahap Evaluasi Program:
 - a. PT melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana baik secara dokumen luaran maupun visitasi lapangan.
 - b. PT melakukan berbagai persiapan untuk PKP dan visitasi dari Direktorat Belmawa.
 - c. PT melalui operator PT mengunggah laporan, video, poster dan PPT untuk PKP dan visitasi.
4. Tahap Pasca Program:
 - a. PT yang lolos PKP dan visitasi menyiapkan konten dan persiapan lain untuk mengikuti ajang anugerah Abdidaya Ormawa.
 - b. PT melalui operator PT mengunggah laporan, video, poster dan PPT untuk persyaratan anugerah Abdidaya Ormawa.
 - c. PT membantu menginisiasi kerjasama kemitraan antara Tim Pelaksana dengan berbagai kelembagaan yang relevan untuk keberlanjutan program.

B. TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Setiap organisasi kemahasiswaan diharapkan memiliki tata kelola yang baik dalam mendukung keberhasilan Program Penguatan Kapasitas Ormawa (PPK Ormawa). Tata Kelola Ormawa dalam mendukung Program Penguatan Kapasitas Ormawa (PPK Ormawa) meliputi aspek visi dan misi organisasi, sumber daya manusia, program kerja, anggaran, dan fasilitas penunjang.

1. Visi dan misi organisasi

Ormawa memiliki visi dan misi organisasi yang digunakan sebagai acuan dasar dalam mengusulkan topik PPK Ormawa. Program yang diusulkan diharapkan memiliki keterkaitan dengan visi dan misi yang dimiliki.

2. Sumber daya manusia

Kepengurusan Ormawa diharapkan terdiri dari berbagai disiplin keilmuan atau berbagai angkatan. Keragaman bidang ilmu atau angkatan diharapkan dapat memberikan jaminan pencapaian tujuan dan berbagai luaran yang harus dicapai. Ormawa yang dalam proses pengusulan program membutuhkan mahasiswa dari luar kepengurusan, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bidang keilmuan sesuai topik yang diusulkan.

3. Program kerja

Ormawa memiliki program kerja yang dijadikan sebagai acuan dalam pengusulan program PPK Ormawa. Program kerja yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan organisasi, penguatan *soft skills*, kompetensi pengurus, dan pengabdian kepada masyarakat. Topik program yang diusulkan memiliki keterkaitan dengan program kerja sebagai jaminan keberlanjutan program. Ormawa perlu menginisiasi semangat keberlanjutan program, dan mempersiapkan kelembagaan serta SDM pemandu keberlanjutan program. Rencana keberlanjutan program harus dituangkan secara tertulis dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut.

4. Anggaran

Anggaran operasional Ormawa digunakan untuk melaksanakan program kerja sesuai ketentuan

di setiap perguruan tinggi. Program PPK Ormawa membutuhkan komitmen dana pendamping yang bersumber dari perguruan tinggi. Ormawa dapat mengalokasikan anggaran yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program PPK Ormawa.

5. Fasilitas Penunjang

Sarana dan prasarana yang dimiliki ormawa dalam bentuk peralatan kantor dan fasilitas penunjang kegiatan organisasi, diharapkan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program PPK Ormawa. Dukungan fasilitas penunjang dari Ormawa untuk tim pelaksana diharapkan dapat mengoptimalkan capaian kinerja dan luaran program.

Dalam mendukung keberhasilan program penguatan kapasitas ormawa, tata kelola organisasi kemahasiswaan secara operasional meliputi antara lain tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pasca program.

1. Tahap Perencanaan Program:

- a. Ormawa secara internal mengadakan konsolidasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan komposisi tim pelaksana dan penyusunan subproposals PPK Ormawa.
- b. Ormawa melakukan seleksi internal terhadap ketua dan anggota tim pelaksana dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Internal Penetapan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana.
- c. Ormawa mendampingi tim pelaksana dalam menyusun proposal PPK Ormawa sesuai sistematika panduan PPK Ormawa.
- d. Ormawa mendampingi tim pelaksana dalam proses mengunggah seluruh persyaratan subproposals untuk diseleksi internal oleh PT dan diseleksi oleh Belmawa.

2. Tahap Pelaksanaan Program:

- a. Ormawa menerima SK lolos pendanaan, Ormawa melakukan penandatanganan kontrak (SPK).
- b. Ormawa melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana program di lapangan.
- c. Ormawa menyediakan fasilitasi, *support system*, pendampingan kepada tim pelaksana.
- d. Ormawa mendampingi tim pelaksana dalam proses mengunggah catatan harian setiap kegiatan ke *logbook* PPK Ormawa.

3. Tahap Evaluasi Program:

- a. Ormawa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana baik secara dokumen luaran maupun visitasi lapangan.
- b. Ormawa melakukan pendampingan tim pelaksana dalam proses persiapan untuk PKP dan visitasi dari Direktorat Belmawa.
- c. Ormawa melakukan pendampingan tim pelaksana dalam proses mengunggah laporan, video, poster dan PPT untuk PKP dan visitasi.

4. Tahap Pasca Program:
 - a. Ormawa yang lolos PKP dan visitasi menyiapkan konten dan persiapan lain untuk mengikuti ajang anugerah Abdidaya Ormawa.
 - b. Ormawa melakukan pendampingan tim pelaksana dalam proses mengunggah laporan, video, poster dan PPT untuk persyaratan anugerah Abdidaya Ormawa.
 - c. Ormawa menginisiasi semangat keberlanjutan program, dan mempersiapkan kelembagaan serta SDM pemandu keberlanjutan program. Rencana keberlanjutan program dituangkan secara tertulis dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut.

C. TATA KELOLA DESA

Salah satu tujuan PPK Ormawa yang berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam pembangunan desa adalah “Menginisiasi kemajuan wilayah desa/kelurahan di Indonesia sesuai topik PPK yang dipilih”. Upaya pencapaian tujuan ini perlu dilakukan dengan pengelolaan program yang baik, terencana, dan terukur, maka penting untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Desa dalam pelaksanaan PPK Ormawa.

Tata Kelola Pemerintahan Desa (TKPD) mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan prinsip akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dan prinsip Pengawasan dituangkan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi. *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. (Sedarmayanti, 2003). Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Untuk mencapai tujuan PPK Ormawa dalam menginisiasi kemajuan wilayah desa/kelurahan, maka program PPK Ormawa dapat menerapkan kelima prinsip tata kelola pengelolaan desa sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan program, termasuk dalam pemilihan dan penetapan sasaran. Pemilihan desa dan kelompok sasaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal pokok seperti potensi desa, permasalahan wilayah, kesesuaian latar belakang kelompok pengusul, serta kemudahan aksesibilitas lokasi. Pemilihan kelompok sasaran program dilakukan mengacu pada indikator topik PPK Ormawa yang dipilih, disesuaikan dengan sumber daya desa. Sebagai contoh topik Sanggar Tani Muda, maka pemilihan lokasi program ditetapkan berdasar adanya aktivitas dan potensi pertanian di wilayah tersebut dan ketersediaan generasi muda yang dapat diajak untuk membangkitkan pertanian di wilayah setempat. Pengumpulan informasi tentang potensi desa dan kesesuaiannya dengan topik PPK Ormawa yang dipilih dilakukan melalui survei awal oleh calon pengusul melalui wawancara, observasi dan dapat dilengkapi pula dengan FGD (*focus group discussion*).

2. Kelompok sasaran dan program yang dipilih dikategorikan sebagai program rintisan atau program pengembangan. Program rintisan adalah program yang dimulai dari awal, belum pernah ada program PPK Ormawa di wilayah itu, dan belum ada masyarakat melakukan kegiatan sejenis. Sedangkan program pengembangan adalah program lanjutan dari kegiatan PPK Ormawa sebelumnya ataupun program pada topik pilihan PPK Ormawa sudah dilakukan oleh masyarakat sebelum mahasiswa datang ke lokasi tersebut, meskipun program PPK Ormawa baru pertama kali akan dilaksanakan di desa tersebut.
3. Akuntabilitas, yaitu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program PPK Ormawa. Penyampaian informasi capaian program dapat dilakukan secara periodik, ataupun ditetapkan sebagai perkembangan awal, perkembangan kemajuan dan capaian akhir. Ada dua media yang dapat digunakan untuk penyampaian informasi perkembangan program, pertama pada komunitas desa, kedua pada media yang disediakan oleh Direktorat Belmawa misalnya melalui PKP (Penilaian Kemajuan Pelaksanaan), ataupun bimbingan kelompok PPK Ormawa.
 - a. Perkembangan awal di tingkat desa antara lain dapat dilakukan dengan menyampaikan hasil *survei* dan FGD kepada komunitas desa yang menetapkan kelompok sasaran dan bentuk program. Bagi kelompok sasaran terpilih disusun sebuah kesepakatan kerja sama untuk kelancaran program PPK Ormawa.
 - b. Perkembangan kemajuan adalah penyampaian informasi tentang capaian pelaksanaan program saat waktu berjalan, dan sekaligus merancang kelengkapan kegiatan yang belum terlaksana.
 - c. Capaian akhir berisi informasi tentang perkembangan kegiatan di akhir waktu administratif program. Dilakukan pemaparan tentang pencapaian tujuan dan indikator, keberhasilan program serta hambatan yang ditemui.
 - d. Penyampaian informasi perkembangan program pada media yang disediakan Direktorat Belmawa akan mengikuti panduan yang ditetapkan.
 - e. Responsibilitas, adalah kesesuaian, atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Pada aspek ini perlu dilakukan evaluasi kesesuaian rencana dengan pelaksanaan program, termasuk penggunaan anggaran. Konsep PDCA (*plan-do-check-action*) dapat diterapkan untuk memastikan kesesuaian pemilihan sasaran, pelaksanaan program dengan tujuan dan pemenuhan indikator program.
 - f. Independensi, yaitu suatu keadaan di mana program PPK Ormawa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu. Pelaksanaan program PPK Ormawa di desa dipastikan memenuhi panduan PPK Ormawa yang berlaku. Kelompok sasaran program dan muatan program dipastikan mengacu pada tujuan dan indikator yang ditetapkan, bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum, dan tidak diarahkan oleh kepentingan eksklusif ataupun kelompok tertentu. Namun demikian

- tim PPK Ormawa bersama masyarakat didorong untuk menjalin mitra untuk kemudahan pelaksanaan program dan keberlanjutannya. Mitra program PPK Ormawa dapat berasal dari pemerintah daerah, pengusaha swasta, serta lembaga sosial kemasyarakatan yang relevan dengan program yang dilaksanakan. Jaringan kemitraan selayaknya dirintis selama pelaksanaan program, dirumuskan peran-peran mitra yang sesuai, dan dibantu penjangkaran mitra oleh Ormawa, dosen pendamping dan juga oleh perguruan tinggi. Independensi juga dicirikan dengan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat desa untuk melanjutkan program. Tim pelaksana PPK Ormawa perlu menginisiasi semangat keberlanjutan di masyarakat, dan mempersiapkan kelembagaan serta SDM pemandu keberlanjutan program. Rencana keberlanjutan ini dituangkan secara tertulis dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut.
- g. Kesetaraan dan kewajaran, secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam pelaksanaan program PPK Ormawa. Kelompok sasaran memiliki kesamaan terhadap akses program PPK Ormawa dan untuk keberlanjutannya.

TRANSPARANSI - PEMILIHAN DESA DAN POKSAR

- Pemilihan desa dan kelompok sasaran. Mengacu pada indikator topik PPK Ormawa yang dipilih, disesuaikan dengan sumber daya desa.
- Survei awal oleh calon pengusul melalui wawancara, observasi, FGD

AKUNTABILITAS- INFORMASI PERKEMBANGAN PROGRAM

- Informasi perkembangan program (Awal, Kemajuan, Akhir).
- Di komunitas desa, dan di tingkat pengelola program (Belmawa).

RESPONSIBILITAS-EVALUASI

- Evaluasi kesesuaian rencana dengan pelaksanaan program dan aspek anggaran.
- Memastikan kesesuaian pemilihan sasaran, pelaksanaan program dengan tujuan dan pemenuhan indikator program.

INDEPENDENSI-TINDAK LANJUT

- Menumbuhkan keinginan masyarakat desa untuk melanjutkan program, mempersiapkan kelembagaan, kemitraan serta SDM pemandu keberlanjutan program dan disusun dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut.

Dalam mendukung keberhasilan Program Penguatan Kapasitas Ormawa, tata kelola desa secara operasional mencakup 4 tahap pelaksanaan kegiatan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pasca program.

1. Tahap Perencanaan Program:

- a. Tim pelaksana melakukan pemilihan desa dan kelompok sasaran dengan mempertimbangkan beberapa hal pokok seperti potensi desa, permasalahan wilayah, indikator topik PPK Ormawa, kesesuaian latar belakang kelompok pengusul, serta kemudahan aksesibilitas lokasi. Pemilihan desa sasaran dilakukan dengan melibatkan tokoh

dan masyarakat melalui survei awal, wawancara, observasi dan FGD.

- b. Tim pelaksana menyusun subproposol PPK Ormawa sesuai sistematika panduan PPK Ormawa dan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam program yang diajukan, dan berkoordinasi dengan dosen pendamping dan Ormawa.
 - c. Tim pelaksana menyerahkan subproposol kepada tim operator untuk proses unggah proposal
2. Tahap Pelaksanaan Program:
- a. Tim pelaksana berkoordinasi dengan pengurus Ormawa tentang administrasi yang berkaitan dengan lolos pendanaan.
 - b. Tim pelaksana bersama masyarakat, dan didampingi oleh Ormawa serta dosen pendamping melaksanakan rangkaian program PPK Ormawa sesuai metodologi yang tertuang dalam Subproposol
 - c. Tim pelaksana secara berkala menyampaikan catatan harian kepada tim operator sebagai bahan pengisian *logbook* PPK Ormawa;
3. Tahap Evaluasi Program:
- a. Tim pelaksana menginformasikan hasil *survei* dan FGD kepada komunitas desa yang menetapkan kelompok sasaran dan bentuk program. Bagi kelompok sasaran terpilih disusun sebuah kesepakatan kerja sama untuk kelancaran program PPK Ormawa.
 - b. Tim pelaksana menginformasikan kemajuan pelaksanaan program kepada komunitas desa dan sekaligus merancang langkah kelengkapan kegiatan yang belum terlaksana.
 - c. Tim pelaksana menginformasikan kepada komunitas desa tentang capaian tujuan dan indikator kegiatan, keberhasilan program serta hambatan yang ditemui di akhir waktu administratif program.
 - d. Tim pelaksana menyampaikan laporan perkembangan program kepada Direktorat Belmawa berupa dokumen tertulis program dan keuangan, video, poster dan presentasi program sesuai ketentuan yang ditetapkan Belmawa.
4. Tahap Pasca Program:
- a. Tim pelaksana PPK Ormawa menginisiasi semangat keberlanjutan program di masyarakat.
 - b. Tim pelaksana mempersiapkan kelembagaan serta SDM masyarakat pemandu keberlanjutan program.
 - c. Tim pelaksana bersama masyarakat menyusun rencana keberlanjutan secara tertulis dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut.
 - d. Tim pelaksana bersama masyarakat merealisasikan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang telah dirintis selama pelaksanaan program.

III. LOKASI DAN TOPIK

A. LOKASI

Desa-desanya atau kelurahan yang menjadi lokasi PPK Ormawa adalah desa yang mudah dijangkau dengan waktu tempuh dari kampus pusat kegiatan maksimal 3 jam perjalanan. Jika ditemui daerah potensial namun akses sulit seperti desa di luar pulau, desa di pegunungan, desa di daerah perbatasan, dan sebagainya yang memiliki waktu tempuh lebih dari 3 jam maka lokasi ini tetap dimungkinkan dengan cara tim pelaksana tinggal menetap di lokasi untuk jangka waktu tertentu disesuaikan dengan kebijakan kampus dan ketercapaian tujuan serta indikator keberhasilan.

Lokasi sasaran kegiatan PPK Ormawa dapat dipilih satu atau lebih dari lima kategori berikut yaitu:

1. Desa di daerah tertinggal mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan desa yang terdapat pada Daerah Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE) Terdapat 95 kabupaten di 17 provinsi yang terdapat pada **Lampiran 23**. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang ada di 17 provinsi yang memiliki kedekatan wilayah dengan ke-95 kabupaten tersebut dapat mengajukan proposal PPK Ormawa sesuai dengan permasalahan masyarakat dan potensi yang ditemukan;
2. Merevitalisasi 63 kawasan transmigrasi mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
3. Desa yang termasuk dari 10.000 desa tertinggal yang perlu dikembangkan agar menjadi desa berkembang, dan dari 5.000 desa berkembang yang perlu dikembangkan menjadi desa mandiri;
4. Desa/kelurahan yang menjadi wilayah binaan kampus; dan/atau
5. Desa/kelurahan yang memiliki potensi sesuai dengan topik yang dipilih.

B. TOPIK

Topik PPK Ormawa adalah jenis-jenis tema atau fokus kegiatan yang disediakan di PPK Ormawa. Setiap tim dipersilahkan untuk memilih salah satu topik untuk berkegiatan di desa sesuai dengan potensi dan masalah yang ditemukan. Setiap topik memiliki indikator keberhasilan yang berbeda beda. Indikator keberhasilan yang ada di dalam buku panduan ini merupakan indikator minimum yang wajib ada di dalam subproposal. Artinya adalah bahwa indikator minimum ini merupakan capaian dasar. Dalam praktiknya setiap tim pelaksana diharapkan tidak hanya mencapai indikator minimum tetapi juga mampu mencapai indikator maksimum dengan jumlah indikator yang lebih banyak, bervariasi dan berkualitas.

Kapasitas ormawa diharapkan dapat meningkat setelah melaksanakan program sesuai latar belakang ormawa. Kapasitas ormawa yang dimaksud adalah terjadi peningkatan tata kelola organisasi yang adaptif dan berorientasi pada penguatan *soft skills* fungsionaris pelaksana. Setiap individu di dalam ormawa dan tim pelaksana mengambil peran aktif dalam menyukseskan program sehingga memiliki pengalaman menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan kompetensi individu. Tim

pelaksana memperoleh peningkatan kompetensi individu dalam bentuk kepemimpinan, pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, berpikir kreatif & kritis, memiliki empati, dan kerjasama dalam tim. Gambaran Topik PPK Ormawa adalah sebagai berikut:

1. DESA/KELURAHAN WIRUSAHA:

- **Deskripsi:** Desa/Kelurahan Wirusaha adalah serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat potensi wilayah yang mampu menggerakkan perekonomian desa.
- **Aktivitas:** Tim Pelaksana bersama masyarakat yang didampingi oleh ormawa berperan dalam mengidentifikasi, mengakses dan mengorganisasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia potensial bagi kegiatan pengembangan usaha ekonomi atau kegiatan bisnis yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai sasaran. Desa/Kelurahan Wirusaha dapat dikembangkan menjadi kegiatan unggulan desa, misalnya dalam program *one village one product* atau *one village one ceo* atau *one village one entrepreneur* atau kebijakan lainnya yang relevan.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Adanya pelaku usaha rintisan minimal 5 orang dan minimal 1 usaha berkelompok;
 2. Terbukanya lapangan kerja baru;
 3. Meningkatnya peran lembaga ekonomi desa / BUMDES / Koperasi / UMKM dalam menggerakkan perekonomian desa/kelurahan;
 4. Terlatihnya pelaku usaha yang sudah ada di wilayah;
 5. Peningkatan pendapatan pelaku usaha yang sudah ada;
 6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa;
 8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan
- **Sasaran** : Pelaku usaha yang sudah ada dan minimal 10 orang dan 2 kelompok serta anggota anggota masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku usaha baru rintisan
- **Produk** : Usaha dan kelembagaan

2. SMART FARMING

- **Deskripsi:** *Smart farming* adalah metode pertanian cerdas berbasis teknologi untuk pertanian masa depan.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama Ormawa membantu masyarakat desa/kelurahan dalam kegiatan merancang ide pertanian modern masa depan dan mengimplementasikannya secara bertahap berbasis pada kemampuan dan daya dukung petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat. Rancangan tersebut disusun berdasarkan temuan potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat perdesaan. Rancangan desain pertanian modern masa depan dapat berupa teknologi budidaya, teknologi panen, teknologi pasca panen, dan atau teknologi pemasaran atau mencakup semua komponen tersebut. Rancangan bersifat

aplikatif, mudah diterapkan dan berkelanjutan.

- **Indikator keberhasilan:**

1. Diterapkannya minimal 1 ide *smart farming* di masyarakat;
2. Terevaluasinya efisiensi dan efektivitas *smart farming* tersebut;
3. Adanya perbaikan *smart farming* berdasarkan hasil evaluasi masyarakat;
4. Terdapat minimal 1 kelompok petani (20-25 orang) yang menerapkan *smart farming*;
5. Peningkatan produktivitas usaha tani yang menggunakan *smart farming*;
6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.

- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan

- **Sasaran** : Minimal 1 Kelompok tani (20-25 orang)

- **Produk** : Inovasi *smart farming* dan inovasi social serta kelembagaan pertanian modern masa depan.

3. SEKOLAH PEREMPUAN

- **Deskripsi:** Sekolah perempuan adalah kegiatan pembelajaran non formal terstruktur yang menggunakan kurikulum tertentu yang dirancang berdasarkan kebutuhan sasaran. Sekolah perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu untuk melindungi dirinya sendiri, meningkatkan kualitas keluarganya, mampu berperan dalam pembangunan desa, memiliki akses terhadap penguasaan sumberdaya ekonomi dan sumberdaya alam, serta menguasai teknologi informasi yang berguna dalam pemberdayaan kaum perempuan.

- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di desa/kelurahan terkait dengan keamanan dan kenyamanan perempuan di desa, kemampuan perempuan dalam mengurus keluarga, pengetahuan perempuan tentang keluarga, pengetahuan dan sikap terhadap peran perempuan dalam pembangunan desa, penguasaan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas dan identifikasi tingkat penguasaan kaum perempuan desa terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Permasalahan dan kebutuhan dalam berbagai aspek tersebut menjadi dasar tim pelaksana untuk menyusun kurikulum pembelajaran yang akan dilaksanakan selama program berjalan. Setiap tim pelaksana melaksanakan 2-3 rombongan belajar sekolah perempuan dengan jumlah peserta per rombongan belajar 20-25 orang.

- **Indikator keberhasilan:**

1. Adanya rancangan kurikulum pembelajaran non formal kaum perempuan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan perempuan di desa, kemampuan perempuan dalam mengurus keluarga, pengetahuan perempuan

tentang keluarga, pengetahuan dan sikap terhadap peran perempuan dalam pembangunan desa, penguasaan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas dan identifikasi tingkat penguasaan kaum perempuan desa terhadap sumberdaya ekonomi dan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya;

2. Adanya pembelajaran di sekolah perempuan minimal 2 rombongan belajar dengan jumlah peserta 20-25 orang per rombongan belajar selama program berjalan dalam 10-16 pertemuan;
3. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta sekolah perempuan terkait dengan materi yang diajarkan;
4. Dimilikinya kemampuan *life skills* dari peserta sekolah perempuan;
5. Adanya kelembagaan non formal yang menghimpun para alumni sekolah perempuan dan memiliki rencana kerja produktif. Kelembagaan ini juga berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan pengembangan diri dari peserta sekolah perempuan;
6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.

- **Lokasi** : Desa/kelurahan
- **Sasaran** : Kaum perempuan di desa/kelurahan

4. DESA/KELURAHAN DIGITAL

- **Deskripsi:** Desa/kelurahan digital merupakan desa/kelurahan yang menerapkan sistem kerja pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti jaringan internet, *hardware computer*, *smart phone*, *mobile phone* dan kelengkapannya. Digitalisasi desa/kelurahan untuk mengembangkan potensi desa, percepatan akses serta pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sarana yang dimiliki.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat yang didampingi ormawa mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan untuk menjadi desa yang lebih maju. Di sisi lain tim pelaksana juga mengidentifikasi ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang ada di masyarakat, baik kepemilikan individu maupun kelembagaan. Selanjutnya tim pelaksana menganalisis peluang memajukan desa/kelurahan dengan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Jika sarana TIK memadai, desa memiliki potensi unggulan, terdapat permasalahan yang mendesak untuk diatasi, dan ada motivasi masyarakat untuk memanfaatkan TIK bagi kemajuan desa maka Desa Digital dapat dilaksanakan.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Adanya minimal 2 jenis inovasi berbasis TIK untuk mengembangkan potensi unggulan desa/kelurahan, percepatan akses dan atau meningkatkan layanan publik;
 2. Adanya kegiatan pengembangan potensi unggulan desa, percepatan akses dan atau

peningkatan layanan publik;

3. Bertambahnya aktivitas masyarakat, baik individu maupun kelembagaan yang berbasis TIK;
4. Peningkatan pendapatan, percepatan akses informasi, dan tingkat kepuasan masyarakat;
5. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
6. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
7. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.

- **Lokasi** : Desa/kelurahan
- **Sasaran** : Anggota masyarakat yang terkait langsung dengan pemanfaatan potensi unggulan desa/kelurahan, aparat desa/kelurahan atau kelembagaan yang terkait dengan layanan publik.
- **Produk** : Inovasi pengembangan desa berbasis TIK

5. SANGGAR TANI MUDA

- **Deskripsi:** Sanggar Tani Muda adalah kelembagaan pemberdayaan petani muda yang berprinsip dari, oleh dan untuk petani muda dalam mencetak petani-petani muda baru yang melek IT, unggul dan inovatif. Sanggar Tani muda juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa melakukan pendataan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan proses regenerasi petani, termasuk pendataan tentang potensi calon-calon petani muda baru. Berdasarkan data tersebut, tim pelaksana, ormawa dan masyarakat merancang program pengembangan kapasitas petani muda berbasis kelembagaan Sanggar Tani Muda. Salah satu bentuk rancangan pengembangan kapasitas tersebut adalah kurikulum pembelajaran non formal untuk petani muda dengan fokus pada pengembangan kapasitas petani agribisnis modern.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Terbentuknya kelembagaan Sanggar Tani Muda;
 2. terselesaikannya minimal 1 permasalahan yang dihadapi petani muda;
 3. Terlaksananya minimal 2 jenis pelatihan peningkatan kapasitas petani muda yang berfokus pada pengembangan agribisnis modern unggulan desa;
 4. Adanya rancangan kurikulum pembelajaran non formal untuk tani muda;
 5. Adanya petani muda baru 5-10 orang yang sudah memiliki rancangan usaha tani;
 6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa pelaksanaan; dan
 8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Desa/kelurahan
- **Sasaran** : Kelompok usia muda di desa/kelurahan usia 15-35 tahun dari unsur petani dan non petani
- **Produk** : Kelembagaan petani muda

6. KAMPUNG KONSERVASI TOGA:

- **Deskripsi:** Kampung konservasi toga adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian dan pemanfaatan tumbuhan obat keluarga (toga) sebagai unggulan wilayah.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa mendesain program pengembangan kawasan konservasi tumbuhan obat berbasis biodiversitas unggulan lokal. Implementasi program ini adalah tim pelaksana bersama sama dengan masyarakat melakukan pemetaan biodiversitas tumbuhan obat unggulan, menetapkan kawasan konservasi, membentuk kelompok-kelompok konservasi, melaksanakan konservasi dengan membudidayakan tumbuhan obat langka di seluruh wilayah sehingga wilayah tersebut memiliki *branding* sebagai pusat konservasi biodiversitas tumbuhan obat. Pusat konservasi ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi tumbuhan obat dengan kelompok konservasi sebagai tutor utama sekaligus sebagai pusat bisnis tumbuhan obat dan produk turunannya.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Terlaksananya Pemetaan Potensi Biodiversitas Tumbuhan Obat Di Seluruh Wilayah Desa/Kelurahan;
 2. Adanya Peta Potensi Biodiversitas Tumbuhan Obat;
 3. Adanya Beberapa Kawasan Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat;
 4. Dilakukannya Budidaya Tumbuhan Obat Di Kawasan Konservasi maupun Di Masyarakat;
 5. Terbentuknya kelompok-kelompok konservasi tumbuhan obat (20-25 orang) yang juga mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis olahan tumbuhan obat;
 6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 7. Terbentuknya kafe jamu dan berjalannya bisnis jamu olahan tumbuhan obat;
 8. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 9. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Desa/kelurahan
- **Sasaran** : Masyarakat
- **Produk** : Produk program dan kelembagaan konservasi tumbuhan obat

7. RUMAH SAMPAH DIGITAL

- **Deskripsi:** Rumah sampah digital adalah kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang mengkoordinir penanganan sampah berbasis aplikasi sehingga menghasilkan keuntungan materi bagi masyarakat dan immateri berupa meningkatnya kualitas lingkungan. Aplikasi digital penanganan sampah dapat dirancang oleh tim pelaksana atau dapat menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada.
- **Aktivitas** : Tim pelaksana bersama masyarakat yang didampingi ormawa membuat kelembagaan lokal manajemen pengelola sampah wilayah berbasis TIK dengan *branding* nama rumah sampah digital. Rumah sampah digital selain sebagai pusat manajemen pengelolaan sampah di wilayah berbasis TIK juga berfungsi sebagai pusat edukasi penanganan sampah, pusat produksi dan

distribusi produk olahan sampah. Rumah sampah digital dapat didirikan di tingkat desa/kelurahan, dusun, kampung, nagari dan sebagainya. Dasar utama pemilihan topik rumah sampah digital adalah jumlah timbulan sampah yang sudah menjadi masalah lingkungan.

- **Indikator keberhasilan:**

1. Berdirinya 1 unit rumah sampah digital induk di tingkat desa/kelurahan dan minimal 1-2 rumah sampah digital di tingkat RW yang dilengkapi dengan pengurus dan SOP kerja;
2. Digunakannya sistem aplikasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemasaran sampah, baik sistem aplikasi rancangan tim pelaksana sendiri atau menggunakan aplikasi yang sudah ada;
3. Minimal sebanyak 10 % dari total kepala keluarga sudah menjadi nasabah atau anggota rumah sampah digital;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. Rumah sampah digital dijadikan sebagai program desa/kelurahan;
6. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
7. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.

- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan

- **Sasaran** : Seluruh masyarakat desa/kelurahan.

- **Produk** : Produk aplikasi dan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis TIK.

8. DESA/KELURAHAN SEHAT

- **Deskripsi:** Desa/kelurahan sehat adalah desa/kelurahan yang memiliki upaya untuk menciptakan kondisi desa/kelurahan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya, termasuk upaya mengatasi permasalahan kesehatan secara nasional seperti stunting, gizi kurang, kematian ibu dan bayinya, dan sebagainya

- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa: (1) merumuskan indikator desa/kelurahan sehat dari aspek bersih, nyaman, aman dan sehat sesuai potensi dan masalah lokal, (2) mengidentifikasi situasi dan kondisi desa/kelurahan sehat berdasarkan indikator, (3) melakukan intervensi terhadap indikator desa/kelurahan sehat yang belum terpenuhi, (4) mengukur capaian indikator setelah pelaksanaan intervensi perbaikan dan (5) mengembangkan kelembagaan untuk keberlanjutan.

- **Indikator keberhasilan:**

1. Adanya rancangan/desain desa sehat yang operasional mengacu ke indikator bersih, nyaman, aman dan sehat sesuai potensi lokal;
2. Meningkatnya kapasitas kader PKK, kader Posyandu dan kader desa/kelurahan sehat lainnya;
3. Adanya Gerakan Keluarga Sadar Gizi; PHBS, Gerakan Pengelolaan Sampah secara mandiri, dan Gerakan Jamban Sehat.
4. Adanya kelembagaan penanggungjawab implementasi desa/kelurahan sehat;
5. Terlaksananya kegiatan preventif dan kuratif terkait dengan kebijakan nasional seperti

persoalan stunting, gizi kurang, kematian ibu dan bayinya;

6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.

- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan
- **Sasaran** : Secara umum masyarakat yang berada di desa/kelurahan
- **Produk** : Produk program dan kelembagaan desa/kelurahan sehat

9. DESA/KELURAHAN CERDAS

- **Deskripsi:** Desa/kelurahan cerdas adalah konsep pengembangan desa/kelurahan yang bertumpu pada peningkatan pemahaman masyarakat bahwa setiap warga masyarakat, apapun profesi dan status sosialnya, perlu menjadi warga yang kompeten. Kompetensi itulah yang digodok, dirancang, dan dikembangkan di pusat-pusat pendidikan masyarakat yang ada di wilayah yang disebut dengan pojok-pojok literasi. Dalam praktiknya pojok literasi adalah pusat pembelajaran masyarakat sesuai dengan kurikulum dan karakteristik peserta yang dilaksanakan di bangunan atau ruangan tertentu yang mudah dijangkau sasaran. Sasaran setiap pojok literasi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat yang didampingi ormawa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang terkait dengan pengembangan kompetensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Permasalahan dan kebutuhan ini menjadi dasar penyusunan kurikulum pembelajaran di setiap pojok literasi. Selanjutnya tim pelaksana bersama masyarakat memetakan calon-calon warga belajar yang akan mengikuti pembelajaran di pojok literasi.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Adanya minimal 5 pojok literasi di suatu wilayah yang melaksanakan mengembangkan pembelajaran non-formal berbasis kebutuhan masyarakat;
 2. Adanya kurikulum pembelajaran non formal yang memuat aspek kecakapan hidup di setiap pojok literasi;
 3. Beroperasinya pojok-pojok literasi dengan program dan kepengurusan yang berbeda-beda;
 4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kecakapan hidup masyarakat yang menjadi peserta pojok literasi;
 5. Tumbuhnya kegiatan ekonomi baru sebagai implementasi keterampilan kecakapan hidup yang diajarkan di setiap pojok literasi;
 6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan
- **Sasaran** : Minimal 20 orang per pojok literasi
- **Produk** : Produk program dan kelembagaan literasi pembelajaran non-formal.

10. KAMPUNG IKLIM

- **Deskripsi:** Kampung Iklim adalah aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada tahun 2015. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi merupakan upaya masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang tidak dapat dielakkan. Sedangkan upaya mitigasi merupakan kegiatan pencegahan penyebab perubahan iklim sekaligus mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa mendesain kegiatan kampung iklim yang memiliki program mandiri, berkelanjutan dan terukur dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desain kegiatan kampung iklim antara lain dapat berupa pengendalian kekeringan, polusi, banjir dan longsor, kreativitas untuk peningkatan ketahanan pangan, penanganan, banjir rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, gelombang tinggi, pengendalian penyakit terkait perubahan iklim, pengelolaan sampah dan limbah padat serta cair, konservasi energi, penggunaan energi baru dan terbarukan, penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca, penghijauan produktif, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Adanya rancangan kampung iklim yang memiliki kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2. Terlaksananya minimal 4 kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis kelompok;
 3. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kampung iklim;
 4. Adanya kelembagaan penanggung jawab kampung iklim yang memiliki kepengurusan dan rencana kerja yang terukur;
 5. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 6. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 7. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan
- **Sasaran** : Seluruh masyarakat di desa/kelurahan
- **Produk** : Program dan kelembagaan desa/kelurahan tangguh iklim

11. DESA/KELURAHAN MARITIM

- **Deskripsi:** Desa Maritim adalah desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Penduduk yang tinggal di daerah pesisir umumnya bekerja atau bermata pencaharian sebagai nelayan. Pembangunan kemaritiman mencakup berbagai pembangunan

perekonomian, peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas lingkungan serta pelayanan kesehatan.

- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa mendesain program pengembangan desa/kelurahan maritim yaitu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada laut, pantai, pesisir dan pulau-pulau. Pengembangan desa/kelurahan maritim tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan keluarganya, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, mengembangkan kelembagaan lokal untuk mendukung desa/kelurahan maritim yang unggul, menginisiasi peningkatan pendidikan masyarakat, dan menumbuhkan upaya upaya peningkatan kesehatan. Masyarakat maritim umumnya terdiri dari kelompok nelayan, petambak, pedagang ikan, pemilik toko, pelaku wisata bahari, serta pelaku industri usaha kecil dan menengah pengolahan hasil tangkapan di laut.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Adanya rancangan pengembangan desa/kelurahan maritim yang unggul sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat;
 2. Adanya kelembagaan lokal pemberdayaan nelayan dan keluarganya jika belum ada dan atau meningkatnya kinerja kelembagaan lama yang sudah ada;
 3. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas nelayan beserta keluarganya melalui pelatihan dan pendampingan (20-25 keluarga nelayan potensial yang melibatkan bapak nelayan, ibu nelayan dan anak nelayan);
 4. Tumbuhnya kelompok kelompok baru (1 – 4 kelompok) yang masing masing focus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, lingkungan dan layanan kesehatan;
 5. Peningkatan pendapatan nelayan yang menjadi sasaran program;
 6. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 7. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 8. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Desa/kelurahan yang memiliki wilayah pantai, pesisir atau laut.
- **Sasaran** : Nelayan dan keluarganya
- **Produk** : program dan kelembagaan desa/kelurahan maritim unggul

12. DESA HUTAN

- **Deskripsi:** Masyarakat desa hutan merupakan sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Masyarakat desa hutan pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat yang didampingi ormawa mendesain konsep pengembangan desa pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Konsep pengembangan desa hutan mengusung *platform* pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan yang didukung oleh kelembagaan lokal yang dinamis,

terukur dan berkelanjutan.

- **Indikator keberhasilan:**
 1. Adanya rancangan pengembangan desa hutan;
 2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat tani hutan beserta keluarganya melalui pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan;
 3. Tumbuhnya kelompok-kelompok baru (1 - 4 kelompok) yang fokus pada kegiatan untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan;
 4. Peningkatan pendapatan masyarakat;
 5. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 6. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 7. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Desa yang berada di pinggiran hutan atau desa yang memiliki wilayah hutan.
- **Sasaran** : Masyarakat dan tokoh masyarakat di desa
- **Produk** : Produk program dan kelembagaan desa hutan berdikari

13. DESA SENI DAN BUDAYA

- **Dekripsi:** Desa/Kelurahan seni budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi seni budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama dengan masyarakat yang didampingi ormawa mengidentifikasi dan menemukan potensi seni budaya lokal yang potensial untuk dikembangkan menjadi unggulan desa. Proses Identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan intervensi untuk meningkatkan atau memaksimalkan peran seni budaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi identifikasi permasalahan yang dihadapi, prospek pengembangan, dan kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki masyarakat untuk mengembangkan potensi seni dan budaya tersebut.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Dilakukan minimal 2 paket intervensi untuk mengembangkan potensi seni budaya menjadi unggulan desa;
 2. Terlestarikannya seni budaya;
 3. Peningkatan pendapatan masyarakat;
 4. Adanya kelembagaan yang memiliki kepengurusan dan rencana kerja yang terukur untuk mengembangkan dan melestarikan potensi seni budaya sebagai unggulan desa/kelurahan;
 5. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 6. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan

7. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.

- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan
- **Sasaran** : Masyarakat secara umum di desa/kelurahan, Penggiat seni budaya baik individu atau kelompok
- **Produk** : Produk usaha di bidang jasa seni dan budaya, termasuk kelembagaan penggiat seni

14. DESA OLAHRAGA

- **Deskripsi:** Desa/kelurahan olahraga adalah desa/kelurahan yang memiliki potensi unggulan aktivitas olahraga baik tradisional dan/atau modern lalu mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa/kelurahan.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dan didampingi ormawa melakukan proses identifikasi potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat yang terkait dengan pengembangan aktivitas keolahragaan, baik olahraga tradisional yang berakar pada kearifan lokal maupun keolahragaan modern. Keolahragaan dimaksud terkait dengan cabang olahraga prestasi.
- **Indikator keberhasilan:**
 1. Dikembangkannya cabang olahraga potensial yang menjadi unggulan desa/kelurahan;
 2. Adanya kelembagaan yang memiliki kepengurusan dan rencana kerja yang terukur untuk mengembangkan kegiatan olahraga prestasi di masyarakat;
 3. Terlaksananya intervensi pembinaan menuju olahraga sebagai unggulan desa/kelurahan
 4. Dihasilkannya desa olahraga yang memiliki keunggulan tertentu;
 5. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 6. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 7. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Wilayah desa/kelurahan
- **Sasaran** : Masyarakat penggiat olahraga di desa/kelurahan
- **Produk** : Produk jasa olahraga unggulan dan kelembagaan

15. DESA WISATA

- **Deskripsi:** Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa mengidentifikasi potensi wisata yang ada di masyarakat, meliputi potensi alam, potensi SDM, potensi seni budaya, potensi kegiatan, dan potensi aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan potensi tersebut tim pelaksana menggali kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi tersebut menjadi desa wisata sesuai keunggulan lokal yang dimiliki.

- **Indikator keberhasilan:**
 1. Ditemukannya potensi SDA, seni budaya, SDM, dan aktivitas ekonomi yang dapat dikolaborasikan untuk mendukung pengembangan desa wisata;
 2. Adanya kesepakatan bersama dengan para tokoh masyarakat untuk mengembangkan desa wisata berbasis potensi unggulan. Pengembangan desa wisata dapat mencakup pengembangan sarana fisik, fasilitas, kelengkapan, daya tarik, kenyamanan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
 3. Adanya kelembagaan pengelola desa wisata yang memiliki pengurus lengkap dan rencana kerja terukur;
 4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola wisata melalui berbagai pelatihan yang diadakan;
 5. *Launching* desa wisata dengan *branding* sesuai potensi unggulan;
 6. Peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat;
 7. Dukungan desa untuk keberlanjutan program;
 8. Peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa; dan
 9. Peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang mendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Wilayah Desa/kelurahan
- **Sasaran** : Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku seni, pengrajin, UMKM
- **Produk** : Jasa desa wisata dan kelembagaan pengelola

16. TOPIK BEBAS

- **Deskripsi:** Adalah topik yang tidak terwadahi di 16 topik sebelumnya.
- **Aktivitas:** Tim pelaksana bersama masyarakat dengan didampingi ormawa melakukan identifikasi potensi dan masalah, mendesain rencana pengembangan, melaksanakan rencana aksi dan mengukur keberhasilan program, merintis kemitraan untuk keberlanjutan.
- **Indikator keberhasilan:** Indikator disusun oleh pengusul yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM masyarakat sasaran, penguatan kelembagaan, peningkatan pendapatan, embrio keberlanjutan dan dihasilkannya peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana PPK Ormawa serta dihasilkannya peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa.
- **Lokasi** : Diuraikan pengusul
- **Sasaran** : Diuraikan pengusul
- **Produk** : Diuraikan pengusul

IV. LUARAN

A. LUARAN WAJIB

Luaran wajib yang harus dihasilkan setiap Ormawa penerima program adalah:

1. Buku Pengembangan Kapasitas dan *Soft skills* Tematik, baik berupa cetak maupun elektronik yang berisi paparan proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang dipilih;
2. Ringkasan eksekutif maksimal 5 (lima) halaman yang berisi deskripsi program dan kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan, *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa yang dikembangkan, testimoni *stake holders*, praktik baik yang diperoleh, dan hal-hal yang perlu diperbaiki, dilengkapi dengan minimal 2 foto kegiatan;
3. Media publikasi elektronik berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal *youtube*, atau kanal lain yang dapat diakses publik; dan
4. Poster dan profil hasil pelaksanaan program (**Lampiran 17 dan Lampiran 18**).

B. LUARAN TAMBAHAN

Selain luaran wajib, **luaran tambahan** antara lain:

1. Produk riil atau *prototype*;
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan/atau internasional;
3. Publikasi media massa;
4. Modul atau manual pembelajaran; dan
5. Luaran tambahan lainnya

V. PENGUSUL DAN PROPOSAL

A. PENGUSUL

Pengusul PPK ORMAWA adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbudristek yang bertanggung jawab terhadap program-program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan. Perguruan tinggi yang bersangkutan mengusulkan **proposal** yang berisi **subproposal** kegiatan yang disusun oleh Organisasi Kemahasiswaan aktif program Sarjana berbagai disiplin yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas/Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Program Studi (HMP) dan disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan resmi yang ada di perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Ketentuan pengusul adalah sebagai berikut:

1. Pengusul **proposal** adalah PT di lingkungan Kemendikbudristek yang bertanggung jawab dalam pembinaan Organisasi Kemahasiswaan; dan
2. Proposal berisi **subproposal-subproposal** program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Ormawa sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal di tingkat PT.

B. PROPOSAL DAN SUBPROPOSAL

Proposal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Proposal diusulkan oleh perguruan tinggi, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, dan mencakup uraian tentang:
 - a. strategi pembinaan dan penguatan kapasitas Ormawa;
 - b. tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menguatkan kapasitas Ormawa;
 - c. bentuk-bentuk sistem pendukung perguruan tinggi untuk pelaksanaan PPK Ormawa
 - d. subproposal yang disusun oleh Ormawa.
2. Menyertakan surat keputusan legalitas pengelola kemahasiswaan dari Rektor/Ketua atau Wakil Rektor/Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan;
3. Menyertakan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Internal Perguruan Tinggi;
4. Proposal diajukan secara daring oleh PT melalui laman <http://php2d.kemdikbud.go.id/>; dan
5. Proposal disusun mengikuti sistematika yang tercantum dalam **Lampiran 1**.

Subproposal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Subproposal diajukan oleh ketua tim yang diketahui oleh ketua Organisasi Kemahasiswaan pengusul dan disetujui oleh Wakil Rektor/Direktur/Ketua Bidang Kemahasiswaan;
2. Jumlah mahasiswa pelaksana berasal dari program Sarjana sebanyak 10-15 orang (minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda dan/atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda). Mahasiswa pelaksana disarankan **minimal** semester 4 dan masih aktif hingga akhir

- pelaksanaan program. Apabila pengusul adalah Himpunan Program Studi (HMP) maka diminta untuk mengajak program studi lain yang relevan;
3. Tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan (kecuali ada hal yang tidak mungkin dihindari);
 4. Tidak diperbolehkan ada pergantian lokasi kegiatan tanpa alasan yang kuat;
 5. Setiap Ormawa hanya ada 1 subproposal yang diupload oleh operator PT ke sistem. Jika ormawa menyusun lebih dari 1 subproposal, maka PT akan menseleksi untuk memilih 1 subproposal yang akan diupload ke sistem;
 6. Satu Dosen Pendamping hanya boleh mendampingi 1 subproposal;
 7. Menyertakan surat pernyataan kesediaan kerja sama dari masyarakat atau mitra (**Lampiran 19**);
 8. Menyertakan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan dari Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Bidang Kemahasiswaan;
 9. Subproposal diajukan secara daring melalui laman <http://php2d.kemdikbud.go.id/>; dan
 10. Subproposal disusun mengikuti sistematika yang tercantum dalam **Lampiran 2**.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN UNGGAH PROPOSAL DAN SUBPROPOSAL

Pendaftaran proposal dan subproposal dilakukan secara daring melalui laman dengan tata cara berikut:

1. Membuka laman: <http://php2d.kemdikbud.go.id/>, menu pendaftaran proposal PPK Ormawa.
2. Masuk ke menu Ajukan Proposal.
3. Mengunggah dokumen elektronik berupa file dengan format PDF sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Legalitas Pengelola Kemahasiswaan;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Internal Perguruan Tinggi (**Lampiran 22**); dan
 - c. Dokumen Proposal.
4. Kembali ke menu PPK Ormawa dan masuk ke menu Ajukan Subproposal.
5. Mengunggah dokumen elektronik berupa file dengan format PDF sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Legalitas Organisasi Kemahasiswaan
 - b. Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama dari Masyarakat atau Mitra; dan
 - c. Dokumen subproposal.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN MEKANISME PROGRAM

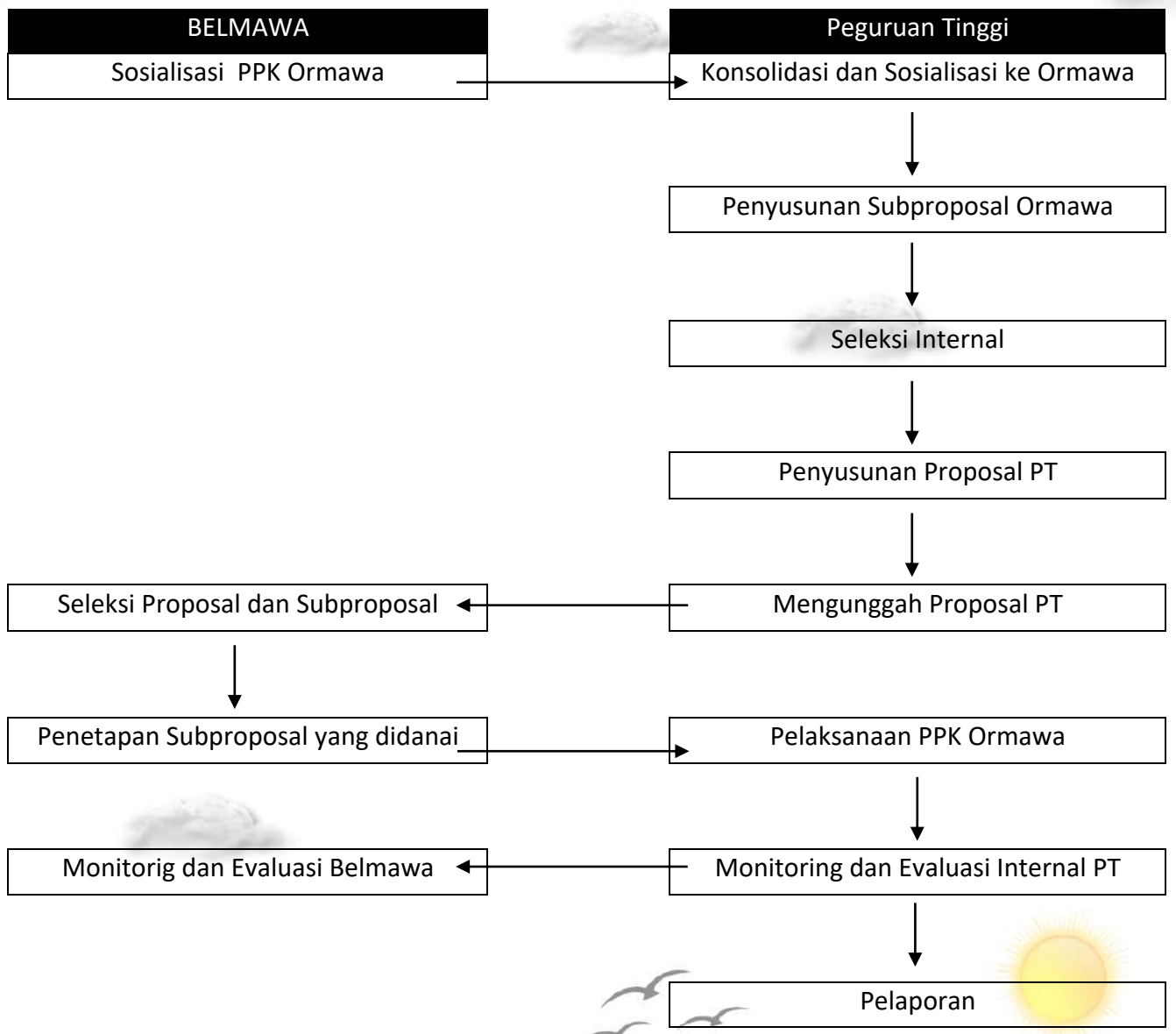
A. INDIKATOR KEBERHASILAN

Monitoring dan evaluasi keberhasilan dilakukan oleh setiap PT pengusul dan tim ormawa untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPK ORMAWA penerima program. Monev mengukur pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan sesuai dengan topik yang dipilih. Keberhasilan pelaksanaan PPK Ormawa dapat diketahui dengan membandingkan data capaian indikator keberhasilan sesuai topik sebelum dan sesudah program. Hasil pengukuran disajikan dalam tabel dan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi.

B. MEKANISME PROGRAM

Mekanisme pelaksanaan kegiatan PPK Ormawa Tahun 2023 yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan PPK ORMAWA kepada penanggung jawab kegiatan pembinaan ormawa dari setiap PT sebagai bentuk bimbingan teknis;
2. Berdasarkan hasil sosialisasi setiap PT mengadakan konsolidasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan subproposal PPK ORMAWA untuk ormawa yang berminat mengusulkan kegiatan;
3. Setiap PT melakukan seleksi internal terhadap semua subproposal yang masuk dan Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Internal PT;
4. Setiap PT menyusun **proposal** PPK ORMAWA sesuai sistematika dan melampirkan **subproposal** dari ormawa yang telah lolos seleksi internal;
5. PT mengunggah seluruh persyaratan, proposal PT dan subproposal yang telah lolos seleksi internal tersebut. Jumlah subproposal dari setiap PT yang diunggah maksimal 16 judul;
6. Proses seleksi proposal adalah seleksi administrasi dan seleksi substansi, sedangkan seleksi subproposal terdiri dari seleksi administrasi, seleksi substansi dan seleksi presentasi;
7. Penetapan proposal dan subproposal yang lolos pendanaan;
8. Penandatanganan kontrak dan penyaluran dana kegiatan melalui rekening Perguruan Tinggi;
9. Pelaksanaan kegiatan;
10. *Support System*, Pendampingan dan *monitoring* internal oleh setiap PT; dan
11. *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan oleh Belmawa.



Gambar 1 Mekanisme Pelaksanaan PPK Ormawa 2023

VII. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. MEKANISME BANTUAN

Pemberian dana bantuan PPK Ormawa Tahun 2023 dilaksanakan dengan tiga skema sebagai berikut:

1. *Merit System*

Pemberian bantuan berdasarkan prestasi Perguruan Tinggi sebelumnya dalam melaksanakan program, sehingga berhak mendapatkan hibah.

2. Pembinaan Perguruan Tinggi

Pemberian bantuan berdasarkan kriteria Perguruan Tinggi yang dinilai masih memerlukan intervensi.

3. Afirmasi untuk Kepentingan Nasional

Pemberian bantuan untuk afirmasi dilakukan berdasarkan kriteria pemerataan dan kepentingan nasional yang mencakup PT di wilayah bencana, PT daerah 3T dan berdasarkan pertimbangan strategis lainnya.

B. BIAYA

Pembiayaan program PPK Ormawa adalah pembiayaan yang diberikan ke PT pengusul yang kemudian Perguruan Tinggi akan menyalurkan dana tersebut ke setiap Ormawa yang subproposalnya lolos seleksi menerima pendanaan. Dana maksimal setiap subproposal adalah **Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)** dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Rancangan biaya secara lengkap, wajar, dan jelas peruntukannya dengan rekapitulasi biaya terdiri atas: bahan habis pakai, peralatan penunjang (kecuali alat kesekretariatan, seminar dan publikasi);
- b. Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk:
 1. Belanja Modal (Peralatan dan Mesin atau Aset Tetap atau Renovasi berupa peralatan dan Mesin) yang tertuang dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
 2. Membiayai kegiatan lain selain kegiatan yang disetujui;
 3. Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
 4. Disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan;
 5. Memberikan sumbangan, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik di tingkat kementerian maupun aparat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat lainnya.
 6. Honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga pembantu lainnya; dan
 7. Pembelian/sewa alat-alat kesekretariatan seperti laptop, kamera, *sound system*, dan lain-lain.

- c. Jika ada dana tambahan dari PT dan/atau dari sumber lain, maka PT melampirkan surat pernyataan dari pemberi dana tambahan tersebut;
- d. Proporsi alokasi penggunaan biaya dapat mengikuti format pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Proporsi Penggunaan Anggaran PPK Ormawa 2023

No	Mata Anggaran	Uraian
1.	Pembelian bahan habis pakai	Berupa komponen dan/atau material dasar untuk bahan pembuatan alat/mesin/produk teknologi lainnya, bahan. (minimal 60%)
2.	Biaya perjalanan lainnya	Perjalanan ke lokasi untuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, konsumsi kegiatan. (maksimal 15%)
3.	Belanja lain-lain	Sewa peralatan, promosi dan publikasi media, pembelian ATK, <i>fotocopy</i> , pulsa, internet, bahan laboratorium, cetak dan penjiilidan. (maksimal 25%)

- e. Perguruan tinggi diharapkan berkontribusi, baik dalam bentuk *in cash* (dana) maupun *in kind* (natura) untuk manajemen mutu pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan, seleksi dan monev internal.
- f. Alat atau barang yang peruntukannya bagi masyarakat wajib melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang di dalam laporan akhir.

C. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan PPK Ormawa 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2 Jadwal Kegiatan PPK Ormawa 2023

No	Kegiatan	2023										
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	M1										
2.	Penawaran Proposal dan Subproposal	M3										
3.	Batas Akhir Penawaran Proposal dan Subproposal		M3									
4.	Seleksi administrasi dan substansi Proposal dan Subproposal		M4	M2								
5.	Seleksi Presentasi Subproposal				M1							
6.	Penetapan Penerima PPK Ormawa Penandatanganan Kontrak				M3							
7.	Penyaluran Bantuan											
	a. Bantuan Tahap I (90%)				M4							
	b. Bantuan Tahap II (10%)									M1		
8.	Pelaksanaan PPK Ormawa					Juni – Oktober 2023						
9.	Pendampingan Mandiri oleh PT					Juni – Oktober 2023						
10.	Penilaian Kemajuan Pelaksanaan								M4			
11.	Pengisian Monev Awal dan Akhir di Sistem					M1			M4			
12.	Visitasi									M2		
13.	Laporan Akhir									M4		

VIII. PENILAIAN PROPOSAL, SUBPROPOSAL, DAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM

A. PENILAIAN PROPOSAL DAN SUBPROPOSAL

Mekanisme penentuan lolos pendanaan dilakukan dengan penilaian terhadap **proposal** dan **subproposal**. Kriteria penilaian proposal yang disusun PT meliputi penilaian terhadap aspek *input*, isi dan keunggulan spesifik yang dimiliki. Penentuan proposal yang lolos pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan proposal dan subproposal. Sedangkan aspek penilaian subproposal meliputi penilaian terhadap perumusan masalah dan tujuan, potensi keberhasilan dan hal-hal yang dinilai unggul. Penilaian subproposal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Seleksi Administrasi

Penilaian dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen proposal dan subproposal.

2. Tahap Seleksi Substansi

Penilaian dilakukan untuk menilai isi proposal dan subproposal dengan menggunakan Form Penilaian Proposal dan Subproposal PPK Ormawa (**Lampiran 10 dan Lampiran 11**).

3. Tahap Seleksi Akhir

Judul subproposal yang lolos seleksi administrasi dan substansi selanjutnya berhak mengikuti seleksi konfirmasi dalam bentuk presentasi subproposal *online*.

B. PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sesuai dengan misi dan tujuan PPK Ormawa, maka keberhasilan pelaksanaan PPK Ormawa di setiap tim akan ditentukan dari penilaian terhadap 5 aspek yaitu:

1. Penilaian kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (**Lampiran 12**)

2. Penilaian *soft skills* fungsionaris organisasi kemahasiswaan (**Lampiran 13**)

3. Penilaian kemampuan pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang adaptif terhadap perubahan. (**Lampiran 14**)

4. Penilaian kompetensi individu mahasiswa pelaksana PPK Ormawa (**Lampiran 15**); dan

5. Penilaian pelaksanaan PPK Ormawa dalam menginisiasi kemajuan wilayah sasaran (**Lampiran 16**).

IX. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan dilakukan oleh PT (evaluasi internal) dan oleh Tim Belmawa (evaluasi eksternal). Bentuk evaluasi eksternal oleh Tim Belmawa dilakukan dengan menganalisis perencanaan, data kemajuan pelaksanaan, dan presentasi hasil akhir yang diperkuat dengan visitasi (*rechecking*) lapangan.

B. PELAPORAN

Terdapat 2 jenis laporan yang wajib disusun oleh Perguruan Tinggi dan tim pelaksana PPK ormawa yaitu,

1. Laporan Kemajuan Capaian 80%

Digunakan untuk dokumen pelengkap pencairan dana termin 2 dan wajib diunggah ke laman <https://php2d.kemdikbud.go.id//> dengan format *file* pdf. Sistematika laporan kemajuan terdapat pada **Lampiran 3**.

2. Laporan Akhir Capaian 100%

Laporan Akhir dan Sublaporan Akhir PPK Ormawa menjadi salah satu komponen penilaian kelas di Abdidaya Ormawa. Laporan Akhir **wajib** diunggah ke laman <https://php2d.kemdikbud.go.id/> dan bagi yang tidak mengunggah Laporan Akhir sampai batas waktu yang ditentukan, tidak dipertimbangkan sebagai peserta Abdidaya Ormawa, serta menjadi pertimbangan pendanaan tahun selanjutnya. Sistematika Laporan Akhir Perguruan Tinggi terdapat pada **Lampiran 4** dan Sublaporan Akhir PPK Ormawa pada **Lampiran 5**.

X. LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SISTEMATIKA PROPOSAL PERGURUAN TINGGI

Jumlah halaman proposal PT maksimum 15 halaman (tidak termasuk lampiran), kertas A4, spasi 1.5, menggunakan *font Times New Roman size 12*. Proposal mengikuti format sampul muka, halaman pengesahan proposal dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 6)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 8)

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL PT

Berisi tentang urgensi pembinaan ormawa di perguruan tinggi, masalah, potensi, rekam jejak pembinaan Ormawa dan gambaran capaiannya serta bentuk *support system* terhadap pelaksanaan PPK Ormawa. Ringkasan juga berisi rencana kegiatan maksimal 16 judul subproposals Ormawa, ditulis dengan jarak satu spasi, huruf *Times New Roman 12*, maksimum dua halaman.

PENDAHULUAN

Menguraikan secara jelas deskripsi PT meliputi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah fakultas, jumlah prodi, jumlah Ormawa, dan gambaran singkat kapasitas dan kinerja Ormawa saat ini yang diukur dengan capaian berbagai prestasi maupun gambaran kompetensi mahasiswa yang terlibat di program. Gambaran program-program perguruan tinggi dalam pembinaan Ormawa, diperkuat dengan paparan peraturan-peraturan PT yang relevan serta gambaran kontribusi Ormawa dalam capaian kinerja PT.

PERMASALAHAN KOMPETENSI MAHASISWA DAN KAPASITAS ORMAWA DI PT

Menguraikan potensi Ormawa dan permasalahan yang dihadapi Ormawa dalam meningkatkan kapasitas diri, tingkat partisipasi mahasiswa di Ormawa, dan jenis-jenis-aktivitas Ormawa dalam berbagai bidang. Dalam bab ini juga dipaparkan masalah-masalah yang dihadapi PT dalam membina Ormawa.

SOLUSI YANG DIRANCANG PT

Menguraikan kebijakan PT yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembinaan Ormawa mekanisme, keorganisasian, program-program PT dalam pembinaan Ormawa, rekam jejak pembinaan, capaian-capaian program, *roadmap* pembinaan mahasiswa jika ada dan bentuk *support system*.

METODE PELAKSANAAN PEMBINAAN *SOFT SKILLS* DAN MEKANISME *MONITORING* DAN EVALUASI

Menguraikan Metode Pelaksanaan Pembinaan, jenis program dan muatan pembinaan, *support system*, mekanisme *monitoring* dan evaluasi dalam pembinaan Ormawa.

REKAPITULASI JUDUL, TOPIK DAN NAMA ORMAWA PENGUSUL

Memuat nama Ormawa pengusul, ketua tim, jumlah anggota tim, judul subproposal, topik yang dipilih dan deskripsi singkat kegiatan dan jumlah serta sumber biaya yang diusulkan.

No	Judul Subproposal	Deskripsi Singkat	Topik	Ormawa Pengusul	Jumlah Biaya

LUARAN

- **Internal**
 - a. Manual/panduan pembinaan ormawa.
 - b. Menghasilkan sejumlah subproposal yang disusun oleh Ormawa.
 - c. Menghasilkan maksimal 16 produk subproposal melalui seleksi yang akan diusulkan ke Dit. Belmawa.
- **Eksternal**
Laporan kegiatan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat oleh Ormawa berdasarkan subproposal yang lolos dan didanai.

ANGGARAN

Anggaran bersumber dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dapat dilengkapi dengan sumber PT serta sumber lainnya yang tidak mengikat.

No	Ormawa Pengusul	Dana Dit. Belmawa	Dana PT	Dana Sumber Lain

JADWAL

Jadwal kegiatan harus rinci dan jelas meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk *Bar-chart*.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Subproposal yang telah diusulkan Ormawa dan lolos seleksi internal PT.
- Lampiran lainnya yang relevan.

LAMPIRAN 2 SISTEMATIKA SUBPROPOSAL ORMAWA

Jumlah halaman subproposol maksimum 15 halaman (tidak termasuk lampiran), kertas A4, spasi 1.5, menggunakan *font Times New Roman size 12*. Subproposol mengikuti format sampul muka, halaman pengesahan subproposol dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 7)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 9)

DAFTAR ISI

RINGKASAN SUBPROPOSAL

Ringkasan subproposol berisi potensi dan permasalahan desa/kelurahan, solusi, tujuan dan luaran yang akan dicapai serta metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan juga berisi uraian singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi, huruf *Times New Roman 12*, dan maksimum satu halaman.

JUDUL

Judul maksimal 20 kata, singkat, spesifik, dan jelas memberi gambaran kegiatan yang diusulkan.

PENDAHULUAN

1. Menguraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi sasaran; dan
2. Menguraikan analisis potensi dan masalah.

SOLUSI PERMASALAHAN

1. Merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan mengacu pada topik kegiatan yang dipilih;
2. Menguraikan semua solusi yang direncanakan untuk menyelesaikan permasalahan; dan
3. Pengambilan keputusan bersama masyarakat sasaran untuk menentukan prioritas solusi permasalahan.

TUJUAN

Rumusan tujuan harus jelas, spesifik, mudah diukur dan merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program.

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPK Ormawa setiap PT pengusul dan tim Ormawa pengusul program melakukan *monitoring* dan evaluasi keberhasilan dengan mengukur capaian tujuan dan indikator keberhasilan sesuai dengan topik yang dipilih. Data perubahan indikator keberhasilan diambil sebelum dan sesudah program, kemudian disajikan dalam tabel dan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi.

LUARAN YANG DIHARAPKAN

1. Luaran Wajib

Luaran wajib yang harus dihasilkan setiap Ormawa penerima program adalah:

- a. Buku Pengembangan *Soft skills* Tematik baik berupa cetak maupun elektronik yang berisi paparan proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang dipilih;
- b. Ringkasan eksekutif maksimal 5 (lima) halaman, kertas A4, spasi 1,5, huruf *Times New Roman* 12, berisi deskripsi program dan kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan, *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa yang dikembangkan, testimoni *stakeholders*, praktik baik yang diperoleh, dan hal-hal yang perlu diperbaiki, dilengkapi dengan minimal 2 foto kegiatan;
- c. Media publikasi elektronik berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal *youtube*, atau kanal lain yang dapat diakses publik; dan
- d. Poster dan profil hasil pelaksanaan program (**Lampiran 17 dan Lampiran 18**).

2. Luaran Tambahan

Selain luaran wajib, ada luaran tambahan antara lain:

1. Produk riil atau *prototype*;
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan/atau internasional;
3. Publikasi media massa;
4. Modul-modul atau manual pembelajaran; dan
5. Luaran tambahan lainnya

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan PPK ORMAWA berisi hal-hal berikut:

1. Menguraikan *roadmap* kegiatan secara jelas, sistematis dan berkesinambungan untuk kurun waktu tertentu sesuai perencanaan tim pelaksana yang dilengkapi dengan target capaian setiap tahun. Roadmap ini menjadi acuan bagi setiap tim pelaksana untuk melaksanakan PPK Ormawa dengan paradigma berpikir berkelanjutan.
2. Menjelaskan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi:
 - a. Mengidentifikasi potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Tahap ini dilakukan dengan metode survei lapangan, observasi, FGD, wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat, tokoh formal maupun non formal dan observasi. Selain data primer, identifikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder seperti data Profil Desa, RPJM Desa, RPJM Kabupaten, dan sebagainya. Data data primer dari survei, FGD, wawancara atau observasi dan data sekunder digunakan sebagai bahan penyusunan subproposals sesuai topik yang dipilih.
 - b. Menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan berdasarkan hasil identifikasi tersebut tim pelaksana membuat rancangan program PPK Ormawa bersama dengan masyarakat atau jika rancangan program sudah disusun di kampus maka tim pelaksana dapat

memusyawarahkan kembali rancangan program tersebut dengan masyarakat untuk memperoleh saran atau masukan.

- c. Menjelaskan deskripsi ringkas khalayak sasaran;
- d. Menguraikan rencana bentuk intervensi yang akan diberikan ke sasaran;
- e. Menguraikan dengan siapa saja tim pelaksana akan bermitra untuk keberlanjutan. Termasuk dijelaskan bagaimana mekanisme konkret kerjasama kemitraan tersebut akan dilaksanakan. Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan dengan berbagai Lembaga/dinas/kantor di luar desa/kelurahan, sedangkan mitra di desa/kelurahan sifatnya menjadi keharusan;
- f. Merumuskan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya sesuai topik
- g. Melaksanakan program bersama masyarakat;
- h. Menguraikan bentuk dukungan pemerintah desa/kelurahan;
- i. Menguraikan bentuk bentuk pembinaan kelompok sasaran dengan tujuan agar kelompok menjadi kuat, mandiri, dinamis dan berdaya;
- j. *Monitoring* dan Evaluasi;
- k. Lokakarya hasil dengan menghadirkan *stakeholder* untuk diseminasi dan publikasi;
- l. Audiensi ke pemerintah setempat untuk mempresentasikan capaian hasil kegiatan dan menjajaki potensi keberlanjutan;
- m. Mengolah data dan menulis laporan;
- n. Menguraikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan setelah laporan diselesaikan, termasuk siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut; dan
- o. Melakukan pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca pelaksanaan program di sistem **(Lampiran 21)**.

JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan harus rinci dan jelas meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk *Barchart* yang memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.

RANCANGAN BIAYA

Dana maksimal yang disediakan untuk setiap judul subproposals PPK Ormawa adalah maksimal **Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)**. PT dan Ormawa perlu menyusun anggaran bersama sama untuk kegiatan lapangan di setiap judul subproposals.

LAMPIRAN

1. Biodata singkat ketua tim pelaksana dan dosen pendamping (menyebutkan riwayat pengalaman membimbing kegiatan kemahasiswaan);
2. Surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari sasaran yang diperkuat dengan pimpinan wilayah **(Lampiran 19)**;
3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa **(Lampiran 20)**; dan
4. Denah lokasi kegiatan.

LAMPIRAN 3 SISTEMATIKA LAPORAN KEMAJUAN PERGURUAN TINGGI

Jumlah halaman laporan kemajuan PT maksimum 10 halaman (tidak termasuk lampiran), kertas A4, spasi 1.5, menggunakan *font Times New Roman size 12*. Laporan kemajuan PT mengikuti format sampul muka, halaman pengesahan laporan kemajuan PT dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 6)

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Ringkasan berisi tidak lebih dari 1 halaman, spasi 1, menggunakan *font Times New Roman size 12* dan merupakan profil dari seluruh laporan Kemajuan Ormawa meliputi hasil-hasil pelaksanaan program. Di bawah ringkasan disertakan 3-5 kata kunci (*keywords*).

PROFIL HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

Menguraikan bentuk-bentuk *support system* PT untuk mendukung capaian keberhasilan program dan gambaran keberhasilan yang diperoleh. Selain itu juga berisi data dalam bentuk tabel yang berisikan tentang nama program, nama ketua pelaksana, nama dosen pembimbing, lokasi kegiatan, hasil pelaksanaan program, capaian indikator keberhasilan, luaran wajib dan luaran tambahan.

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

Penjelasan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program yang telah dilakukan dan dirancang perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan berisi uraian tentang dampak program terhadap tata kelola organisasi kemahasiswaan, kompetensi mahasiswa pelaksana dan kemajuan desa.

LAMPIRAN

Laporan keuangan (rekapan penggunaan dana 80% - 90% masing-masing subproposal) sesuai dengan format dibawah ini:

Nama Ormawa :

Judul Program :

Jumlah Bantuan :

No	Kegiatan Utama	Kegiatan	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Pembelian bahan habis pakai	1 dst			
2.	Biaya perjalanan lainnya	1 dst			
3.	Belanja lain-lain	1 dst			
Jumlah					

LAMPIRAN 4 SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PERGURUAN TINGGI

Jumlah halaman laporan akhir maksimum 10 halaman (tidak termasuk lampiran), kertas A4, spasi 1.5, menggunakan *font Times New Roman size 12*. Laporan Akhir mengikuti format sampul muka, halaman pengesahan laporan akhir dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 6)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 8)

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Ringkasan berisi tidak lebih dari 1 halaman, spasi 1, menggunakan *font Times New Roman size 12* dan merupakan profil dari seluruh laporan akhir Ormawa meliputi hasil-hasil pelaksanaan program. Di bawah ringkasan disertakan 3-5 kata kunci (*keywords*).

PROFIL HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

Menguraikan bentuk bentuk *support system* PT untuk mendukung capaian keberhasilan program dan gambaran keberhasilan yang diperoleh. Selain itu juga berisi data dalam bentuk tabel yang berisikan tentang nama program, nama ketua pelaksana, nama dosen pembimbing, lokasi kegiatan, hasil pelaksanaan program, capaian indikator keberhasilan, luaran wajib dan luaran tambahan.

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

Penjelasan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program yang telah dilakukan dan dirancang perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan berisi uraian tentang dampak program terhadap tata kelola organisasi kemahasiswaan, kompetensi mahasiswa pelaksana dan kemajuan desa.

LAMPIRAN

1. Laporan keuangan (rekapan penggunaan dana 100% dari masing-masing subproposal) contoh format dibawah ini:

Nama Ormawa :

Judul Program :

Jumlah Bantuan :

No	Kegiatan Utama	Kegiatan	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian bahan habis pakai	1 dst			
2.	Biaya perjalanan lainnya	1 dst			
3.	Belanja lain-lain	1 dst			
Jumlah					

2. Dokumentasi dukungan PT terhadap pelaksanaan PPK Ormawa

LAMPIRAN 5 SISTEMATIKA SUBLAPORAN AKHIR ORMAWA

Jumlah halaman sublaporan akhir maksimum 10 halaman (tidak termasuk lampiran), kertas A4, spasi 1.5, menggunakan *font Times New Roman size 12*. Sublaporan Akhir mengikuti format sampul muka, halaman pengesahan sublaporan akhir dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 7)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 9)

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Ringkasan berisi tidak lebih dari 1 halaman, spasi 1, menggunakan *font Times New Roman size 12* dan merupakan inti sari dari seluruh tulisan meliputi latar belakang, tujuan, metode dan hasil. Di bawah ringkasan disertakan 3-5 kata kunci (*keywords*).

PENDAHULUAN

Penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan serta manfaat kegiatan untuk waktu yang akan datang dan alasan pemilihan topik.

GAMBARAN UMUM SASARAN

Penjelasan mengenai kondisi nyata sasaran kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci meliputi teknik, tahapan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program.

HASIL PELAKSANAAN

Penjelasan mengenai potensi, kondisi awal sasaran, proses kegiatan hasil pelaksanaan program, kondisi akhir sasaran dan keberlanjutan program.

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

Penjelasan mengenai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dengan mendeskripsikan pencapaian tujuan dan indikator yang sudah ditetapkan. Data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel. Dosen pendamping memberikan rekomendasi terhadap keberhasilan program dan keberlanjutan program.

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan berisi uraian tentang tingkat keberhasilan program dilaksanakan mengacu pada capaian tujuan dan capaian indikator keberhasilan. Pada bab ini berisi saran-saran konkret untuk tindak lanjut program.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi kegiatan;
2. Profil;
3. Poster;
4. Publikasi;
5. Laporan keuangan (rekap penggunaan dana dan bukti pembelian /*invoice* dilampirkan).
6. Berita Acara Serah Terima (BAST)/jika diperlukan

**LAMPIRAN 6 FORMAT SAMPUL MUKA PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/ LAPORAN AKHIR
PERGURUAN TINGGI**

**PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR
PROGRAM Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan
(PPK ORMAWA)**



(Lambang Perguruan Tinggi)

Oleh:
(NAMA PERGURUAN TINGGI)
(KOTA)
(TAHUN)

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

LAMPIRAN 7 FORMAT SAMPUL MUKA SUBPROPOSAL/SUBLAPORAN AKHIR ORMAWA

**SUBPROPOSAL/SUBLAPORAN AKHIR
PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(PPK ORMAWA)**

(JUDUL KEGIATAN)



(Lambang Perguruan Tinggi)

Oleh:

(Nama Ketua Pengusul (NIM) – Tahun Angkatan)
(Nama Anggota Pengusul (NIM) – Tahun Angkatan)

Dosen Pembimbing:

Nama Dosen (NIP/NIDN)

(NAMA PERGURUAN TINGGI)

(KOTA)

(TAHUN)

LAMPIRAN 8 FORMAT HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/LAPORAN AKHIR PT

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/LAPORAN AKHIR PT

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Pimpinan Pengelola Kemahasiswaan PT
 Nama Lengkap :
 NIP/NIDN :
 Jabatan Struktural :
 No. Telepon/HP :
 Email :
 No. Telepon/HP Perguruan Tinggi :
 E-mail Perguruan Tinggi :
3. Jumlah Anggota Pengelola Kemahasiswaan :
4. Jumlah Dosen Pendamping :
5. Jumlah Subproposal yang diusulkan :
6. Biaya Total yang diusulkan (Rp) :
 Direktorat Belmawa (Rp) :
 Dana Tambahan PT (Rp) :
 Sumber Dana lain (Rp) :

(Kota, Tanggal Bulan Tahun)

Menyetujui, Pengusul,
 Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan Pimpinan Pengelola Kemahasiswaan

Cap dan tanda tangan

Tanda tangan

Nama lengkap
NIP/NIDN

Nama lengkap
NIP/NIDN

LAMPIRAN 9 FORMAT HALAMAN PENGESAHAN SUBPROPOSAL/SUBLAPORAN AKHIR ORMAWA

HALAMAN PENGESAHAN SUBPROPOSAL/SUBLAPORAN AKHIR

1. Judul Subproposal :
2. Topik :
3. Nama Organisasi Kemahasiswaan :
4. Ketua Pengusul
Nama Lengkap :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Perguruan Tinggi :
No. Telepon/HP :
E-mail :
5. Jumlah Anggota Pengusul (orang) :
6. Dosen Pendamping
Nama Lengkap, Gelar :
NIP/NIDN :
No. Telepon/HP :
7. Lokasi Kegiatan/Mitra
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jarak PT ke lokasi desa (km) :
Waktu tempuh PT ke lokasi :
8. Jangka waktu pelaksanaan (bulan) :
9. Biaya Total (Rp) :
Direktorat Belmawa (Rp) :
Sumber lain (Rp) :
Bentuk Dukungan PT :

(Kota, Tanggal Bulan Tahun)

Menyetujui,
Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan

Cap dan tanda tangan

Nama lengkap

NIM

Pengusul,

Ketua Tim

Tanda tangan

Nama lengkap

NIM

Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan

Cap dan tanda tangan

Nama lengkap

NIP/NIDN

LAMPIRAN 10 FORMAT PENGEMBALIAN SISA DANA

KOP PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Pengembalian Sisa Dana PPK ORMAWA 2023

Yth. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Up. Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
di Jakarta

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Bantuan Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) 2023 NomorE2/PPK/SPK/PPK ORMAWA/2023, bersama ini kami laporkan dari dana bantuan kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) 2023 dengan judul: sebesar RP.....(.....*terbilang*.....) yang telah kami terima, terdapat sisa dana sebesar Rp. RP.....(.....*terbilang*.....) yang harus disetor ke Kas Negara.

Sehubungan dengan hal itu, untuk pengembalian sisa dana tersebut kami mengharapkan bantuan Saudara dengan mencetak **e-biling** guna pengembalian dana tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wakil Rektor III/Ketua Ketua
III Bidang Kemahasiswaan
Univ/Inst/ST

Tanda tangan dan Cap

(.....)
NIP/NIDN

*Surat permohonan dapat dikirim melalui email: ormawa.belmawa@gmail.com

LAMPIRAN 11 KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal yang disusun menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:-

1. **Gambaran jumlah partisipasi mahasiswa yang aktif di Ormawa; menampilkan data data kuantitatif persentase jumlah mahasiswa yang aktif di ormawa dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa yang ada.**
2. **Capaian prestasi Ormawa dan gambaran kontribusi prestasi Ormawa dalam capaian kinerja PT;** gambaran prestasi yang dicapai ormawa sebagai organisasi, baik di tingkat local, regional, nasional dan internasional. Termasuk gambaran kontribusi ormawa dalam capaian kinerja PT.
3. **Gambaran capaian kompetensi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Ormawa;** memberikan informasi tentang kompetensi individu mahasiswa yang aktif di ormawa, terkait dengan kompetensi *soft skills*. Lebih bagus jika ada data pendukung.
4. **Tingkat peran PT dalam pembinaan Ormawa dan aturan-aturan yang mendukungnya;** gambaran berbagai kebijakan, kegiatan dan alokasi pendanaan dari PT untuk pembinaan ormawa.
5. **Jumlah dan keragaman jenis aktivitas Ormawa;** menyajikan data jenis jenis aktivitas yang dilakukan oleh seluruh ormawa yang ada di PT.
6. **Inovasi dan kreativitas PT dalam pembinaan Ormawa, termasuk roadmap pembinaan Ormawa;** menggambarkan jenis jenis kreasi dan inovasi PT dalam membina ormawa, ditampilkan juga roadmap pembinaan ormawa, jika ada
7. **Bobot support system;** menggambarkan bentuk bentuk sistem pendukung pembinaan ormawa, kebijakan, SDM, pendanaan, reward system dan sebagainya.
8. **Bentuk proses money pembinaan Ormawa.,** menggambarkan bentuk bentuk sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukanb oleh OT dalam pembinaan ormawa.

LAMPIRAN 12 KRITERIA PENILAIAN SUBPROPOSAL

Penilaian subproposol yang disusun menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Ketajaman identifikasi potensi dan masalah (kelengkapan data primer, sekunder, kedalaman proses pengumpulan data).
2. Kecermatan rumusan masalah (kesesuaian rumusan masalah dengan data dan topik)
3. Kejelasan rumusan tujuan (jelas , menggambarkan perubahan, mudah diukur)
4. Ketajaman roadmap keberlanjutan (sekuensi atau keruntutan, kejelasan kegiatan, peluang ketercapaian/kemudahan dilaksanakan),
5. Kesesuaian sasaran (sasaran jelas baik keragaman dan jumlahnya, mewakili wilayah secara merata, sesuai topik).
6. Ketepatan bentuk intervensi yang diberikan ke masyarakat (kesesuaian intervensi dengan tujuan dan indicator keberhasilan, kedalaman intervensi dan kesiapterapan inovasi).
7. Ketepatan metode pengembangan masyarakat (metode yang dipilih yang memberi peluang lebih besar untuk tercapainya tujuan dan indicator keberhasilan, metode yang menumbuhkan partisipasi masyarakat, metode yang beragam tidak hanya pelatihan atau penyuluhan).
8. Ketepatan pengukuran indikator keberhasilan sesuai topik (metode pengukuran indicator keberhasilan)
9. Dukungan kelembagaan desa/kelurahan dan perguruan tinggi (bentuk dukungan, sifat dukungan apakah mengarah ke keberlanjutan).
10. Kegiatan tindak lanjut (rencana keberlanjutan yang sistematis dan terukur)
11. Inisiasi Jejaring kemitraan (jumlah mitra, jenis mitra, wilayah kerja mitra)
12. Hal lain yang dinilai unggul (keunikan inovasi, partisipasi masyarakat yang luar biasa, peluang berkontribusi di skala regional atau nasional, perjuangan tim yang mengagumkan, dll)

LAMPIRAN 13 KRITERIA PENILAIAN KAPASITAS ORMAWA

Penilaian kapasitas ormawa pada pengelolaan program kerja ormawa dapat menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Relevansi visi, misi dan tujuan ormawa terhadap pengelolaan program kerja ormawa.
2. Kekuatan dukungan tata kelola ormawa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan program kerja ormawa.
3. Kekuatan motivasi dan kompetensi pengurus ormawa guna meningkatkan keaktifan berorganisasi dan berkegiatan pada program kerja ormawa.
4. Keterkaitan program kerja ormawa dan tingkat keterlibatan pengurus sebelumnya dalam pengelolaan program kerja ormawa.
5. Kekuatan dukungan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ormawa dalam menjalankan pengelolaan program kerja ormawa.
6. Kekuatan penjangkaran kerjasama pihak luar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan program kerja ormawa.
7. Tingkat intensitas proses monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan program kerja ormawa serta perubahan kompetensi pengurus dan kapasitas ormawa.
8. Kekuatan manajemen keuangan dan penggalian dana ormawa dari sumber lain di luar dana PT untuk meningkatkan kinerja pengelolaan program kerja ormawa.
9. Akuntabilitas dan kelengkapan proses pengadministrasian keuangan ormawa dalam pengelolaan program kerja ormawa.

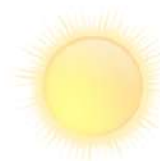


LAMPIRAN 14 KRITERIA PENILAIAN *SOFT SKILLS* FUNGSIONARIS ORMAWA

Pendukung Pelaksanaan PPK Ormawa

Kriteria penilaian ini digunakan untuk mengukur *soft skills* mahasiswa yang menjadi fungsionaris organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Sasaran penilaian adalah fungsionaris organisasi kemahasiswaan yang menjadi pengurus harian yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Ormawa perguruan tinggi dapat mengembangkan instrumen penilaian *soft skills* sesuai kebutuhan. Aspek-aspek *soft skills* yang dapat diacu oleh fungsionaris pendukung pelaksanaan PPK Ormawa meliputi:

1. Bertindak konsisten sesuai aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas (**integritas**)
2. Melaksanakan tugas yang telah diberikan secara sungguh-sungguh (**tanggung jawab**)
3. Interaksi yang dibangun secara santun (**komunikasi**)
4. Menerima dan memberikan masukan secara kolaboratif yang mendahulukan kepentingan bersama (**kerjasama**)
5. Mempelajari hal-hal baru dengan cepat (**adaptif**)
6. Memberikan arahan yang baik dalam memimpin tim (**kepemimpinan**)
7. Mengelola emosi diri sendiri (**pengendalian diri**)
8. Membagi waktu antara perkuliahan dengan mengelola organisasi (**manajemen waktu**)
9. Menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan program (**menyelesaikan masalah**)
10. Menelaah informasi yang diterima untuk mengambil keputusan (**berpikir kritis**)



LAMPIRAN 15 KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN ORMAWA

Penilaian kemampuan pengelolaan ormawa yang adaptif pada pengelolaan PPK Ormawa dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penentuan dan penetapan pengurus ormawa yang dilibatkan sebagai tim pendukung dalam pelaksanaan PPK Ormawa.
2. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penentuan dan penetapan tim pelaksana PPK Ormawa yang sesuai dengan ketentuan Panduan PPK Ormawa.
3. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penyusunan instrumen penilaian untuk mengukur perubahan kompetensi individu dan kapasitas ormawa.
4. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penilaian *pre-test* dan *post-test* menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun ormawa.
5. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam pembinaan dan pelatihan untuk menguatkan kemampuan pengelolaan ormawa pada pelaksanaan PPK Ormawa.
6. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam mengarahkan, terlibat aktif, mengawasi dan memfasilitasi tim pelaksana PPK Ormawa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program.
7. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penyusunan konsep strategi, tata kelola organisasi, prosedur standar, dan panduan operasional pelaksanaan PPK Ormawa.
8. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam identifikasi permasalahan di lapangan dan penetapan topik program yang sesuai dengan visi misi tujuan Ormawa.
9. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penyusunan subproposal, termasuk penyusunan anggaran, jadwal kegiatan dan manajemen resiko (*risk management*).
10. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam aktivitas langsung di lapangan dan pembuatan output program
11. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam penguatan jejaring mitra (internal kampus, internal desa/kelurahan, pihak luar lainnya)
12. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam peningkatan dukungan anggaran tambahan dan sarana prasarana dari jejaring mitra.
13. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam monitoring evaluasi dan penilaian terhadap ketercapaian indikator keberhasilan, ketercapaian tujuan, ketercapaian output, administrasi dan manajemen keuangan, serta penilaian terhadap perubahan kompetensi individu tim pelaksana PPK Ormawa.
14. Kemampuan pengelolaan Ormawa dalam pengembangan keberlanjutan yang mencakup kebijakan Ormawa, pemutakhiran data, roadmap keberlanjutan, kelembagaan mandiri, kesiapan anggaran keberlanjutan, dan komitmen mitra (internal kampus, internal desa/kelurahan, pihak luar lainnya).

LAMPIRAN 16 KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI INDIVIDU MAHASISWA PELAKSANA PPK ORMAWA

Penilaian kompetensi individu mahasiswa pelaksana PPK Ormawa menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Mampu mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam ormawa agar dapat bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan ormawa (**Kepemimpinan**)
2. Kemampuan menerima dan memberi masukan, kolaborasi kerja tim, empati dengan rekan sejawat dan mendahulukan profesionalitas melaksanakan tugas (**Kemampuan bekerja dalam tim**)
3. Perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi orang lain (**Kepedulian Sosial**)
4. Kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu (**Kemampuan Berpikir Kreatif**)
5. Kemampuan membantu ormawa untuk menentukan sumber masalah dan menemukan solusi yang efektif (**Kemampuan Problem Solving**)
6. Kemampuan komunikasi secara santun dalam melaksanakan tugas dan kegiatan ormawa (**Kemampuan Berkomunikasi**)
7. Kemampuan bekerja sama untuk memberikan gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama di dalam ormawa (**Kemampuan Berkolaborasi**)
8. Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara tepat untuk mencapai tujuan ormawa (**Kemampuan Literasi Teknologi Informasi**)
9. Pemahaman terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (**Tingkat Penguasaan Isi Program**)
10. Berpikir yang berlandaskan pada usaha memetakan, menemukan dan penyelesaian masalah untuk mencapai keberhasilan program (**Berpikir Analitis**)
11. Keteguhan memegang pendapat atau mempertahankan pendirian (**Kegigihan**)
12. Sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dengan segala risiko ditimbulkan (**Tanggung Jawab**)

LAMPIRAN 17 KRITERIA PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

Penilaian pelaksanaan program oleh tim pelaksana sesuai topik yang dipilih menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran program
2. Tingkat keberhasilan metode (tingkat partisipasi masyarakat, ketercapaian tujuan, Indikator Keberhasilan dan Target Luaran)
3. Kinerja tim (kekompakan, intensitas kehadiran tim dalam kegiatan),
4. Peran Dosen Pendamping (kualitas, keragaman)
5. Peran Perguruan Tinggi (kualitas, keragaman)
6. Peran pemerintah desa (kualitas, keragaman)
7. Potensi keberlanjutan Program (kualitas, dukungan desa, kemitraan, partisipasi masyarakat).

LAMPIRAN 18 FORMAT POSTER PPK ORMAWA

Poster yang akan dibuat hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Poster berjumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar ukuran A1 untuk disosialisasikan di perguruan tinggi masing-masing (*hardcopy*) dan 1 (satu) lembar ukuran A4 untuk di lampirkan pada laporan akhir (*hardcopy* dan *softcopy*);
2. Poster harus memuat judul, nama pelaksana dan logo Perguruan Tinggi, latar belakang/introduksi/ringkasan, metode, hasil (teks dan gambar/fotografi/skema), simpulan, referensi (tambahan), sponsor/lembaga (+logo), detail kontak, tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan keterangan Latar belakang, hendaknya singkat langsung kepada tujuan permasalahan (Tujuan – Metode – Hasil Temuan – Simpulan dan Saran);

LAMPIRAN 19 FORMAT ISIAN PROFIL PPK ORMAWA

Setiap kelompok mahasiswa pelaksana program PPK Ormawa tahun 2023 agar mempersiapkan sejak awal informasi ringkas mengenai program PPK Ormawa yang dilaksanakan, yang meliputi hal sebagai berikut:

1. Judul PPK Ormawa;
2. Tim pelaksana dan nomor HP, dosen pembimbing, organisasi kemahasiswaan, Perguruan Tinggi;
3. Kontak person masyarakat yang dianggap paling intensif berhubungan / menangani program PPK Ormawa, minimal 5 orang (nama, profesi dan Nomor HP);
4. Program-program yang dilaksanakan dan metode pelaksanaannya;
5. Inovasi, teknologi, kelembagaan yang diterapkan bersama masyarakat (jelaskan secara ringkas deskripsi inovasi/teknologi tersebut);
6. Capaian atau hasil kegiatan, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, solusi permasalahan masyarakat yang dihasilkan dari program;
7. Cakupan wilayah, cakupan sasaran;
8. Kemitraan yang terlaksana selama program;
9. Bentuk keberlanjutan program yang telah terlaksana;
10. Minimal lima foto terbaik, bagus dan tajam yang mencirikan program, proses pelaksanaan, hasil/output;
11. Poster 1 halaman yang menggambarkan program PPK ORMAWA (latar belakang, metode, tahap pelaksanaan, teknologi/inovasi yang diterapkan, kelompok sasaran dan lokasi program, hasil, identitas kelompok mahasiswa pelaksana); dan
12. Jumlah profil maksimal 4 halaman A4, terdiri dari teks profil 2 halaman, poster 1 halaman, foto-foto 1 halaman.

LAMPIRAN 20 SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ketua Kelompok Pengusul(judul PPK Ormawa)

Nama :

NIM :

Alamat :

Telp /HP / Email :

Nama Ormawa :

Jabatan di Ormawa :

Perguruan Tinggi :

Nama Desa/Kelurahan :

Kecamatan :, Kab/Kota:

Provinsi :

Nama Kepala Desa/Kel. :

Alamat :

Telp / HP /Email :

Jika subproposol ini diterima dan didanai, kami siap bekerja sama untuk melaksanakan PPK ORMAWA ini guna mempererat dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan.

Demikian pernyataan kerja sama ini kami buat dengan sebenarnya, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan pelaksanaan PPK ORMAWA Tahun 2023

(Kota, Tanggal Bulan Tahun)

Ketua Kelompok

Tanda tangan

Nama lengkap

NIM

Mengetahui :

Dosen Pendamping

Tanda tangan

Nama lengkap

NIP/NIDN

Kepala Desa/Kelurahan

Tanda tangan dan Cap

Nama lengkap

NIP

LAMPIRAN 21 SURAT PERNYATAAN PELAKSANA PPK ORMAWA

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PELAKSANA PPK ORMAWA 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Pelaksana :

NIM :

Nama Ormawa :

Dengan ini menyatakan bahwa subproposal PPK ORMAWA yang saya ajukan untuk tahun anggaran 2023 dengan judul berlokasi di Desa/Kelurahan* Kecamatan Kabupaten/Kota* Propinsi

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Organisasi Kemahasiswaan (*nama Organisasi Kemahasiswaan pada PT*)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

(Kota, Tanggal Bulan Tahun)

Menyetujui,
Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan



yang menyatakan



Cap dan tanda tangan

tanda tangan

Nama lengkap

Nama lengkap

NIM

NIM

Mengetahui:

Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

tanda tangan

tanda tangan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIDN

LAMPIRAN 22 FORM PEMUTAKHIRAN DATA SASARAN

Judul Program :
 Tahun Pelaksanaan :
 Perguruan Tinggi :
 Ketua Pelaksana :
 Ormawa :

No	Kelembagaan / Kelompok / Kegiatan yang Ada / Terbentuk	Waktu Terbentuk	Jumlah Anggota	Ketua dan No HP	Alamat	Kegiatan Kelompok dan Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

- Cukup jelas
- Tuliskan lembaga/kelompok/kegiatan yang terbentuk pada saat PPK Ormawa dilaksanakan (dalam masa kontrak). Tuliskan pula pada nomor terpisah, lembaga/kelompok baru jika ada yang terbangun di masa pasca PPK Ormawa (setelah kontrak berakhir)
- Tuliskan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya lembaga/kelompok yang ditulis pada kolom 2
- Tuliskan jumlah anggota/masyarakat yang aktif dalam kegiatan lembaga/kelompok tersebut
- Nama dan nomor HP ketua/pengurus lembaga/kelompok
- Alamat sekretariat/kantor/tempat berkumpul/pusat kegiatan lembaga/kelompok
- Tuliskan semua jenis kegiatan lembaga/kelompok dan volume setiap jenis kegiatannya.
 - Contoh : Kelompok Peternak Sapi
 - Kegiatan :
 - Pemeliharaan sapi kelompok. Volume: 120 sapi
 - Pengolahan limbah sapi menjadi pupuk organik. Volume: 5 ton/minggu
 - Pembuatan silase. Volume: 30 ton/bulan
 - Musyawaharah kelompok. Volume: 1 kali/bulan
 - dst....

LAMPIRAN 23 BERITA ACARA SELEKSI INTERNAL PERGURUAN TINGGI

**KOP PERGURUAN TINGGI
BERITA ACARA
SELEKSI INTERNAL PERGURUAN TINGGI PROPOSAL PPK ORMAWA
TAHUN**

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

No.	Nama Penilai Internal PT	Jumlah SubProposal yang diseleksi	Jumlah SubProposal yang diajukan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
....				

Dengan ini menyatakan telah melakukan seleksi internal SubProposal PPK Ormawa 2023 dari *Nama Perguruan Tinggi, Kota* pada tanggal s/d. sejumlah (*terbilang*) SubProposal dan SubProposal PPK Ormawa yang telah lolos seleksi internal Perguruan Tinggi sejumlah (*terbilang*) SubProposal.

(Kota, Tanggal Bulan Tahun)
Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
Bidang Kemahasiswaan
Cap dan tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIDN

LAMPIRAN 24 DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020 – 2024 DAN DAERAH P2KE

No	Provinsi	Kabupaten	Keterangan
1.	Sumatera Utara	Nias	Daerah Tertinggal
2.	Sumatera Utara	Nias Selatan	Daerah Tertinggal
3.	Sumatera Utara	Nias Utara	Daerah Tertinggal
4.	Sumatera Utara	Nias Barat	Daerah Tertinggal
5.	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Daerah Tertinggal
6.	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Daerah Tertinggal
7.	Lampung	Pesisir Barat	Daerah Tertinggal
8.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Daerah Tertinggal
9.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Daerah Tertinggal
10.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Daerah Tertinggal
11.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Daerah Tertinggal
12.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Daerah Tertinggal
13.	Nusa Tenggara Timur	Belu	Daerah Tertinggal
14.	Nusa Tenggara Timur	Alor	Daerah Tertinggal
15.	Nusa Tenggara Timur	Lembata	Daerah Tertinggal
16.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Daerah Tertinggal
17.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Daerah Tertinggal
18.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Daerah Tertinggal
19.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Daerah Tertinggal
20.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Daerah Tertinggal
21.	Nusa Tenggara Timur	Malaka	Daerah Tertinggal
22.	Sulawesi Tengah	Donggala	Daerah Tertinggal
23.	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Daerah Tertinggal
24.	Sulawesi Tengah	Sigi	Daerah Tertinggal
25.	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Daerah Tertinggal
26.	Maluku	Kepulauan Aru	Daerah Tertinggal
27.	Maluku	Seram Bagian Barat	Daerah Tertinggal
28.	Maluku	Seram Bagian Timur	Daerah Tertinggal
29.	Maluku	Maluku Barat Daya	Daerah Tertinggal
30.	Maluku	Buru Selatan	Daerah Tertinggal
31.	Maluku Utara	Kepulauan Sula	Daerah Tertinggal
32.	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Daerah Tertinggal
33.	Papua Barat	Teluk Wondama	Daerah Tertinggal
34.	Papua Barat	Teluk Bintuni	Daerah Tertinggal

No	Provinsi	Kabupaten	Keterangan
35.	Papua Barat	Sorong Selatan	Daerah Tertinggal
36.	Papua Barat	Sorong	Daerah Tertinggal
37.	Papua Barat	Tambrau	Daerah Tertinggal
38.	Papua Barat	Maybrat	Daerah Tertinggal
39.	Papua Barat	Manokwari Selatan	Daerah Tertinggal
40.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	Daerah Tertinggal
41.	Papua	Jayawijaya	Daerah Tertinggal
42.	Papua	Nabire	Daerah Tertinggal
43.	Papua	Paniai	Daerah Tertinggal
44.	Papua	Puncak Jaya	Daerah Tertinggal
45.	Papua	Boven Digoel	Daerah Tertinggal
46.	Papua	Mappi	Daerah Tertinggal
47.	Papua	Asmat	Daerah Tertinggal
48.	Papua	Yahukimo	Daerah Tertinggal
49.	Papua	Pegunungan Bintang	Daerah Tertinggal
50.	Papua	Tolikara	Daerah Tertinggal
51.	Papua	Keerom	Daerah Tertinggal
52.	Papua	Waropen	Daerah Tertinggal
53.	Papua	Supiori	Daerah Tertinggal
54.	Papua	Mamberamo Raya	Daerah Tertinggal
55.	Papua	Nduga	Daerah Tertinggal
56.	Papua	Lanny Jaya	Daerah Tertinggal
57.	Papua	Mamberamo Tengah	Daerah Tertinggal
58.	Papua	Yalimo	Daerah Tertinggal
59.	Papua	Puncak	Daerah Tertinggal
60.	Papua	Dogiyai	Daerah Tertinggal
61.	Papua	Intan Jaya	Daerah Tertinggal
62.	Papua	Deiyai	Daerah Tertinggal
63.	Aceh	Kab. Aceh Barat	Daerah P2KE
64.	Aceh	Kab. Pidie	Daerah P2KE
65.	Aceh	Kab. Bireuen	Daerah P2KE
66.	Aceh	Kab. Nagan Raya	Daerah P2KE
67.	Aceh	Kab. Aceh Jaya	Daerah P2KE
68.	Aceh	Kab. Pidie Jaya	Daerah P2KE
69.	Bengkulu	Kab. Kaur	Daerah P2KE
70.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Daerah P2KE

No	Provinsi	Kabupaten	Keterangan
71.	Gorontalo	Kab. Pohuwato	Daerah P2KE
72.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	Daerah P2KE
73.	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	Daerah P2KE
74.	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Daerah P2KE
75.	Maluku	Kab. Buru	Daerah P2KE
76.	Maluku	Kota Tual	Daerah P2KE
77.	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	Daerah P2KE
78.	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	Daerah P2KE
79.	Papua	Kab. Jayapura	Daerah P2KE
80.	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	Daerah P2KE
81.	Papua	Kab. Mimika	Daerah P2KE
82.	Papua	Kota Jayapura	Daerah P2KE
83.	Papua Barat	Kab. Fak-fak	Daerah P2KE
84.	Papua Barat	Kab. Manokwari	Daerah P2KE
85.	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	Daerah P2KE
86.	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	Daerah P2KE
87.	Sulawesi Barat	Kab. Majene	Daerah P2KE
88.	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	Daerah P2KE
89.	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	Daerah P2KE
90.	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	Daerah P2KE
91.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	Daerah P2KE
92.	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	Daerah P2KE
93.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	Daerah P2KE
94.	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	Daerah P2KE
95.	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	Daerah P2KE

